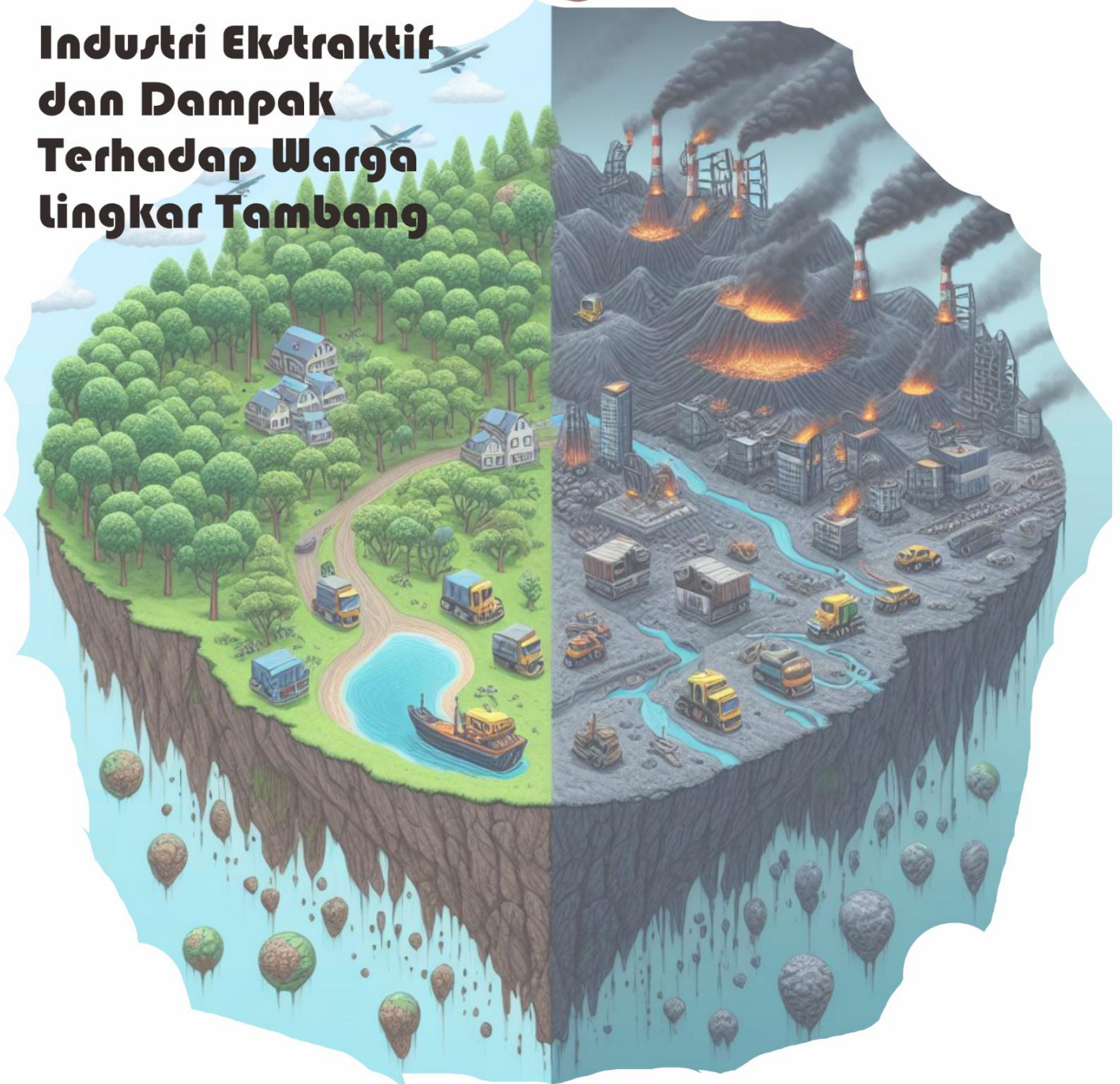




## Industri Ekstraktif dan Dampak Terhadap Warga lingkar Tambang





# AHOMA INDUSTRI EKSTRAKTIF DAN DAMPAK TERHADAP WARGA LINGKAR TAMBANG

**Penulis :**

Kisran Makati

Andi Rahman

Danial

**Dokumentasi :**

Nadir Aris Kidu

Fatmawati

**Design dan Layout :**

Didi Hardiana

**Dibuat Oleh :**

Pusat Kajian & Advokasi Hak Asasi Manusia

Sulawesi Tenggara



# Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	4
1.3 Manfaat Penelitian .....	4
<b>Bab II Metodologi .....</b>	<b>6</b>
2.1 Metode Penelitian .....	6
2.1.1 Lokasi Penelitian .....	6
2.1.2 Metode Penelitian .....	7
2.1.3 Pendekatan yang digunakan .....	8
<b>Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian .....</b>	<b>10</b>
A. Pembahasan .....	10
3.1. Blok Mandiodo Nasibmu Kini .....	10
B. Hasil Penelitian .....	17
3.2. Kehilangan AHOMA-Rusaknya Biodiversitas dan Hilangnya Kearifan Lokal .....	17
3.3. Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, Ekonomi, Kesehatan dan Korupsi SDA .....	25
a. Kerusakan Lingkungan .....	25
b. Kondisi Kesehatan Masyarakat Lingkar Tambang .....	39
c. Transformasi Ekonomi Masyarakat Dari Laut Ke Tambang .....	33
d. Kasus Korupsi di Blok Mandiodo .....	40
3.4 Lemahnya Pengawasan Dalam Aktivitas Tambang .....	43
3.5. Industri Pemurnian (Smelter) .....	45
1) Aktivitas Industri Smelter VDNI dan OSS .....	45
2) Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) .....	45
3) Obsidian Stainless Steel (OSS) .....	48
4) Jetty .....	48
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	53
Daftar Pustaka .....	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta sebaran Orang Tolaki .....	11
Gambar 2: Wawancara dengan Sinauri (83 thn) .....	12
Gambar 3: Wawancara dengan Puma (81 thn) .....	13
Gambar 4 : Kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan Masyarakat dan Habitat Anoa ...	18
Gambar 5 : Kondisi jalan dan Blok Mandiodo .....	27
Gambar 6 : Perubahan tutupan hutan 3 tahun terakhir di blok mandiodo.....	28
Gambar 7 : Kondisi laut yang sudah tercemar, dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan sebelum adanya tambang nikel .....	29
Gambar 9 : Kondisi pesisir laut yang sudah tercemar, dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan sebelum adanya tambang nikel. ....	31
Gambar 8 : Kondisi Puskesmas Tapunggya.....	31
Gambar. 9 : Kondisi Lingkungan Masyarakat .....	33
Gambar 10 : Ikan asap milik pedagang di Kelurahan Molawe .....	35
Gambar 11 : Hasil tangkap nelayan mulai berkurang sejak adanya tambang nikel.....	39
Gambar 12 : Nampak Kondisi Pasar di hari-hari biasa.....	39
Gambar 13 : Nampak aktivitas i Pasar di Desa Tapunggya .....	50
Gambar 14 : Smelter Virtue Dragon Nikel Industri di Kec. Morosi, Kab. Konawe.....	50
Gambar 15 : Kondisi Udara di Wilayah Smelter OSS.....	51
Gambar 16 : Jetty 1 dan 2 milik PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo .....	51



## **Ringkasan Eksekutif**

Penyusunan dokumen hasil riset ini untuk menggambarkan dampak buruk industri pertambangan nikel hulu-hilir yang menjadi komoditas utama dalam pembuatan baterai kendaraan Listrik dan baja tahan karat yang mengadakan NPI. Secara lebih spesifik penyusunan dokumen hasil riset ini akan mengulas dampak pertambangan nikel terhadap lingkungan, hutan, biodiversity dan kehidupan Masyarakat di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Massifnya eksploitasi nikel di mandiodo merupakan keinginan besar oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk mempercepat pembuatan baterai kendaraan Listrik. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, yakni 23,7% dari total cadangan dunia. Tiga daerah dengan kandungan nikel terbesar terdistribusi di Sulawesi Tenggara (32%), Maluku Utara (27%), dan Sulawesi Tengah (26%).

Dengan Cadangan nikel yang dimilikinya menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang di incar oleh para investor untuk melakukan investasi, salah satu daerah yang sudah di kuasai oleh investor adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada tahun 2021 terdapat 143 IUP nikel, dan 59 IUP berada di Konawe Utara salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Tenggara, dengan jumlah IUP yang banyak menjadikan Konawe Utara sebagai daerah pemilik IUP terbanyak di Sulawesi Tenggara.

Izin Usaha Pertambangan yang ada merupakan implikasi dari pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Dimana undang-undang ini membuka kerang perizinan kegiatan pertambangan nikel, melalui undang-undang ini pemerintah lantas menerbitkan ratusan IUP nikel di Sulawesi Tenggara, sehingga memicu peningkatan Produksi dan ekspor bijih nikel, terutama ke Tiongkok. Puncaknya terjadi di tahun 2013 dengan ekspor bijih nikel

Indonesia yang mencapai 64,8 juta ton dengan nilai USD 1,6 milyar.<sup>20</sup> Di tahun yang sama, Indonesia menjadi pemasok utama bijih nikel ke Tiongkok (50%). Tak berhenti disitu saja, ambisi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi melalui nikel terus berlanjut, sehingga pada tanggal 8 Agustus 2019, Presiden Jokowi Kembali menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Penerbitan Perpres No. 55 Tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan serta

menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan cara mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan.

Di tahun yang sama Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan larangan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Kebijakan ini mempertimbangkan pertambahan nilai nikel melalui proses pengolahan di dalam negeri serta pesatnya pembangunan smelter beberapa tahun terakhir sehingga memerlukan pasokan nikel yang cukup.

Meskipun di atas kertas terlihat indah, tetapi ambisi pembangunan industri dari hulu ke hilir justru melahirkan berbagai tragedi ekologis. Di sinilah urgensi mengkritisi pertambangan nikel, terutama di pulau-pulau kecil yang memiliki kerentanan serius dari ancaman bencana, seperti gempa bumi dan tsunami, serta dari ancaman kenaikan air laut akibat krisis iklim.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam industri nikel sebagai negara dengan cadangan terbesar di dunia, dan nikel menjadi mineral utama dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik. Dengan demikian, upaya global untuk mengatasi krisis iklim sangat tergantung pada ekstraksi nikel yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, adalah krusial untuk memastikan bahwa proses produksi nikel untuk baterai tetap mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku secara internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak negatif dari penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitarnya. Fokusnya mencakup kerusakan pada beragam aspek lingkungan, termasuk deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati baik di daratan maupun di pesisir laut yang disebabkan oleh aktivitas tambang dan kegiatan transportasi material lainnya.

Selain itu, penelitian juga akan mengevaluasi dampak pencemaran limbah padat dan cair terhadap tanah, air, dan ekosistem perairan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap pembuangan limbah industri seperti asap dan debu industri, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada ekosistem sebagai penyangga bagi bentang alam di daratan maupun di pesisir laut. Dengan menyelidiki dampak-dampak ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi ekologis dan sosial dari kegiatan industri nikel di Indonesia serta menawarkan solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Posisi geografis Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara melintang dari Utara ke Selatan. Batas wilayah administrasi Kecamatan Molawe, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langgikima, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lasolo, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Andowia. Selain itu, Konawe Utara mempunyai beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), yang terdiri dari Sungai besar dan kecil yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi, pembangkit

tenaga Listrik dan air bersih, seperti Sungai Lasolo, Lalindu, Molawe, Awila dan Awila Puncak.

Potensi sumber daya air cukup melimpah terutama pada 2 sungai utama yang menjadi tempat bermuaranya sebagian besar Sungai-sungai di Konawe Utara yaitu Sungai Lasolo dan Lalindu yakni sekitar 7 miliar meter-kubik per tahun, atau setara dengan 222 m<sup>3</sup>/detik, dengan perincian kontribusi masing-masing. Lasolo hulu sebanyak 2.855 juta m<sup>3</sup>/tahun atau 81.98 m<sup>3</sup>/detik setara dengan 36,93 persen, Sedangkan Lasolo Hilir sebanyak 619 juta m<sup>3</sup>/tahun atau 19.64 m<sup>3</sup>/detik setara dengan 8,85 persen, Lalindu Hulu sebanyak 728 juta m<sup>3</sup>/tahun atau 23.08 m<sup>3</sup>/detik setara dengan 10,39% dan Lalindu Hilir sebanyak 254 juta m<sup>3</sup>/tahun atau 8.06<sup>3</sup> m<sup>3</sup>/detik setara dengan 3,63%.<sup>1</sup>

DAS Lasolo merupakan aliran sungai yang terbesar dan utama di Kabupaten Konawe Utara yang dari hulu ke hilirnya memiliki panjang 126 km dengan sebagian hulunya masuk daerah Sulawesi Tengah. DAS Lasolo juga melintang di Kecamatan Molawe, yang memiliki Sub DAS Watima dengan luas 1058, Sub DAS Mandiodo 1 dengan luas 129, Sub DAS Mandiodo 2 dengan luas 116, Sub DAS Aalaa Himbua, Sub DAS Aalaa Emea, dan sub DAS lainnya. DAS Lasolo yang melintang melewati desa-desa dan sekitar tambang, membuat DAS Lasolo tidak dapat terhindar dari dampak pertambangan.

Untuk **Karst** terdekat di wilayah Blok Mandiodo berada di Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara. Dengan jarak tempuh dari Kecamatan Molawe ke Kecamatan Oheo kurang lebih 37,8 km. Di wilayah Kecamatan Molawe sendiri belum ditemukan karst, sehingga Tim tidak mengulas panjang dalam hal ini.

Berbeda dengan **Pantai** yang menjadi penting diamati, sepanjang Pantai dari Desa Mowundo sampai Tapungaya merupakan habitat mangrove, pasir, lamun, terumbu karang, sebagian kecil tebing karang, dan lumpur. Walaupun untuk saat ini, sepanjang jalan yang dimaksud, Tim belum melihat pohon-pohon mangrove, kecuali di muara DAS Lasolo. Namun, Tim mengkonfirmasi Hargono, yang mengatakan bahwa baru 1-2 tahun terakhir ini, sejak warga desa melakukan reklamasi pantai, habitat mangrove ikut tertimbun tanah reklamasi. Pantai dalam wilayah Kecamatan Molawe (Dahulu

---

<sup>1</sup> BWS 4 Kendari Tahun 2021.

Kecamatan Lasolo) merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo, masuk dalam wilayah konservasi laut. Merupakan teluk yang memiliki keanekaragaman hayati. Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra menjadikan Teluk Lasolo sebagai salah satu sitenya. Salah satu jenis ikan yang ada di wilayah tersebut adalah ikan lumba-lumba.

Menurut kesimpulan dari pihak BKSDA, dalam laporan monitoring TWAL yang telah dibagi oleh Tim, ada 6 point, yakni:

1. Terumbu karang di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo dalam kondisi rusak sampai baik dengan nilai tutupan karang hidup 22% – 65%.
2. Secara umum kondisi ekosistem terumbu karang Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo dalam kondisi sedang menghampiri baik terlihat dari nilai rata-rata penutupan karang hidup adalah 48%.
3. Terumbu karang yang masih dalam kondisi baik, yaitu pada stasiun IV (Pasir Panjang), VII (Teluk Cinta), VIII (We Nenang) dan IX (Toros Tampali) dengan tutupan karang hidup 53% - 65%.
4. Terumbu karang dalam kategori kondisi sedang di temukan pada stasiun I (Batu Asahan), II (Pasir Merah), III (Hole Bakau) IV (Dolipo) dan X (Tokkoh Kulei) dengan penutupan karang hidup keras antara 41% – 48%.
5. Terumbu karang yang dengan kondisi buruk adalah stasiun V (Sijubi) dimana persentase penutupan karang hidup 22%.
6. Faktor utama penyebab kerusakan terumbu karang adalah kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang pernah terjadi di sekitar kawasan terlihat dengan tingginya nilai rata - rata patahan karang mati yaitu 17%, serta melimpahnya *Acanthaster planci* yang mengakibatkan nilai rata-rata karang mati cukup tinggi yaitu 14%.

Sementara hasil dari dokumentasi dengan menggunakan drone, Tim di lapangan melihat sebagian pesisir di wilayah tersebut berwarna coklat. Menurut salah satu informan, Pak Haris (salah seorang eks nelayan di Kelurahan Molawe), jika terjadi musim hujan, air laut dari pesisir pantai mulai berwarna coklat. Haris juga menceritakan, sepanjang pantai di wilayah Molawe ini dahulu merupakan zona tangkap nelayan, termasuk di dekat daratan Marombo yang kini juga sudah mengalami pencemaran yang sama.

Wilayah **Pulau** yang terdekat dengan daratan Blok Mandiodo terdapat Pulau Bahulu, Pulau Meong, dan di sebelah utaranya terdapat Pulau Labengki Besar dan Pulau Labengki Kecil. Pulau-pulau tersebut merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan Sulawesi Tenggara. Sampai hari ini, Tim belum memiliki data yang cukup untuk melihat kedua pulau terdekat dengan daratan Blok Mandiodo. Namun, jika melihat dokumentasi pesisir pantai di Blok Mandiodo dan berdasarkan keterangan informan, maka nasib Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo, menjadi bagian wilayah terdampak.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Kajian ini bertujuan menelusuri dampak aktivitas industri nikel terhadap deforestasi, dan ancaman biodiversitas di Kabupaten Konawe Utara.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada warga Blok Mandiodo tentang kondisi di daratan maupun di laut, serta menjadi informasi ilmiah bagi pemerintah dalam upaya pengelolaan Pertambangan.

# BAB II

## METODOLOGI PENELITIAN



## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1 Metode Penelitian**

##### **2.1.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Mandiodo, Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Molawe merupakan bagian dari Kabupaten Konawe Utara yang telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Secara geografis Kecamatan Molawe terletak di Utara Kabupaten Konawe Utara melintang dari Utara ke Selatan antara 02o97' dan 03o86' lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121o49' dan 122o49' bujur Timur.<sup>2</sup>

Batas wilayah Administrasi Kecamatan Molawe berada di, sebelah Utara Berbatasan dengan Molawe, Sebelah timur berbatasan dengan laut banda, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan lasolo. Luas wilayah kecamatan molawe yaitu 365,06 KM2 atau 7,27 persen dari luas wilayah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu kecmatan ini terdiri dari 9 (Sembilan) desa dan 1 (satu) kelurahan.

Luas wilayah menurut Desa dan Kelurahan sangat beragam, Desa Tapunggaya merupakan wilayah desa yang terluas yaitu 118,07 km<sup>2</sup> Sedangkan Wilayah Desa terkecil adalah Desa MOWUNDO dengan luas 12,64 km<sup>2</sup>, Adapun luas keseluruhan desa/kelurahan Kec. Molawe dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel : Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Jumlah Menurut Desa/Kelurahan, Kec. Molawe Tahun 2021.

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Presentase %
1	Desa Mataiwoi	29,75	8,01
2	Bandaeha	41,65	11,33
3	Kel. Molawe	34,16	9,39
4	Awila	31,64	3,31
5	Mowundo	12,64	3,31

---

<sup>2</sup> BPS Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Molawe Tahun 2021

6	Mandiodo	26,00	7,18
7	Tapunggay	118,07	32,60
8	Awila Puncak	12,74	3,31
9	Tapuemea	59,03	16,30
<b>Jumlah</b>		<b>365,06</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Desa/Kelurahan  
Diolah : Oleh Tim Peneliti Tahun 2023*

Topografi Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi yang permukaan tanahnya bergunug, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran renda yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, selain memiliki dataran, Molawe juga memiliki wilayah perairan baik itu laut maupun Sungai dengan potensial yang menonjol yaitu kekayaan hasil laut disamping juga memiliki panorama yang indah. Sehingga perairan yang dimiliki sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan darat dan pengembangan wisata.

Selain itu, kecamatan molawe di kenal dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan musim banyak dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup diatas wilayahnya. Pada bulan Desember sampai dengan Mei, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah sebelumnya melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim penghujan. Sekitar bulan September, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan kadang-kadang kurang dan kadang-kadang lebih. Musim ini oleh para pelaut setempat dikenal sebagai musim Pancaroba.<sup>3</sup>

### **2.1.2 Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: observasi partisipatoris, wawancara, dan studi dokumen. Metode ini digunakan karena di anggap oleh peneliti efektif dalam melakukan pendalaman data dan informasi kebutuhan hasil riset.

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan, mengambil dokumentasi, dan berinteraksi dengan beberapa orang yang berada di wilayah penelitian. Kemudian wawancara langsung dilakukan untuk menggali informasi langsung kepada Masyarakat terdampak aktivitas pertambangan nikel di blok mandiodo.

---

<sup>3</sup> Bps Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Molawe Tahun 2021

### **2.1.3 Pendekatan yang Digunakan**

Tim berharap bahwa pendekatan yang digunakan adalah ekologi politik, yang menekankan bahwa permasalahan deforestasi hutan di Blok Mandiodo tidak terjadi secara kebetulan belaka. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, dan hal ini tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik yang ada. Ada beragam aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Pendekatan ekologi politik ini mendorong kerja sama multipihak dalam merumuskan kebijakan pro lingkungan antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, media, dan universitas.

Meminjam pandangan dari Li dan Semedi (2022), ciri utama dari rezim ekstraktif yang telah mengakar di Indonesia sejak 1966 adalah keberadaan kemampuan para pejabat pemerintah, politisi, dan kroni swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Mereka memiliki kekebalan hukum yang kokoh, yang berarti kegiatan mereka telah terlembaga dan diatur secara hierarkis. Semakin tinggi jabatan mereka, semakin besar kekuasaan mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Pandangan ini mencerminkan situasi yang terjadi di Blok Mandiodo, di mana PT. Antam, setelah memenangkan konsesi dari PT. Sriwijaya, menjalin kerja sama dengan PT. LAM tanpa memiliki izin eksplorasi sendiri. Yang lebih mengejutkan, dari 38 perusahaan yang bermitra dengan PT. LAM, banyak yang terlibat dalam eksploitasi bijih nikel secara mandiri dan menjualnya tanpa melaporkan kepada PT. Antam.

Pandangan ini menyoroti kompleksitas dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam industri ekstraktif di Indonesia, serta perlunya tindakan yang lebih tegas untuk mengatasi praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.

# BAB III

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

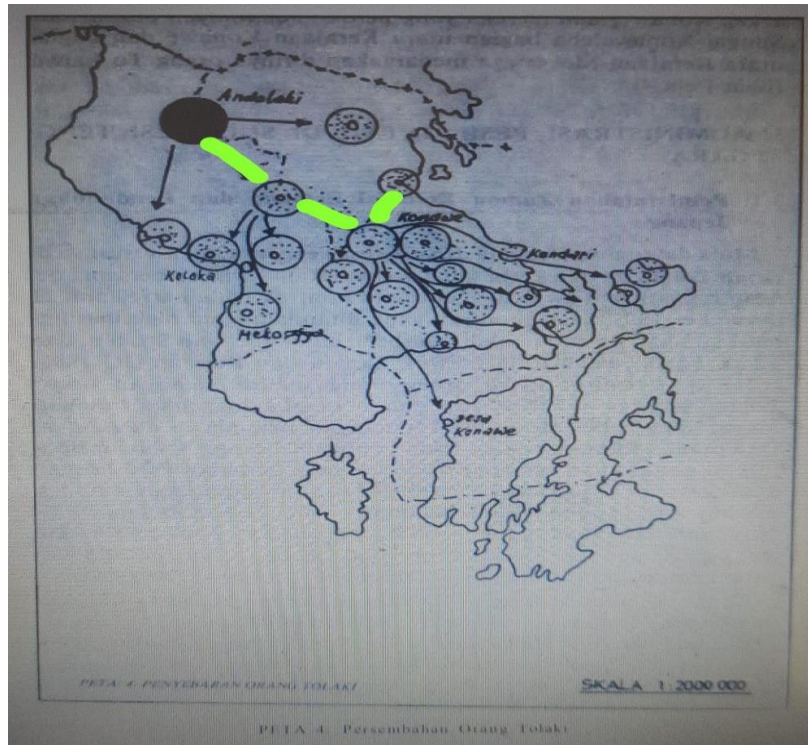


## **A. Pembahasan**

### **3.1. Blok Mandiodo Nasibmu Kini**

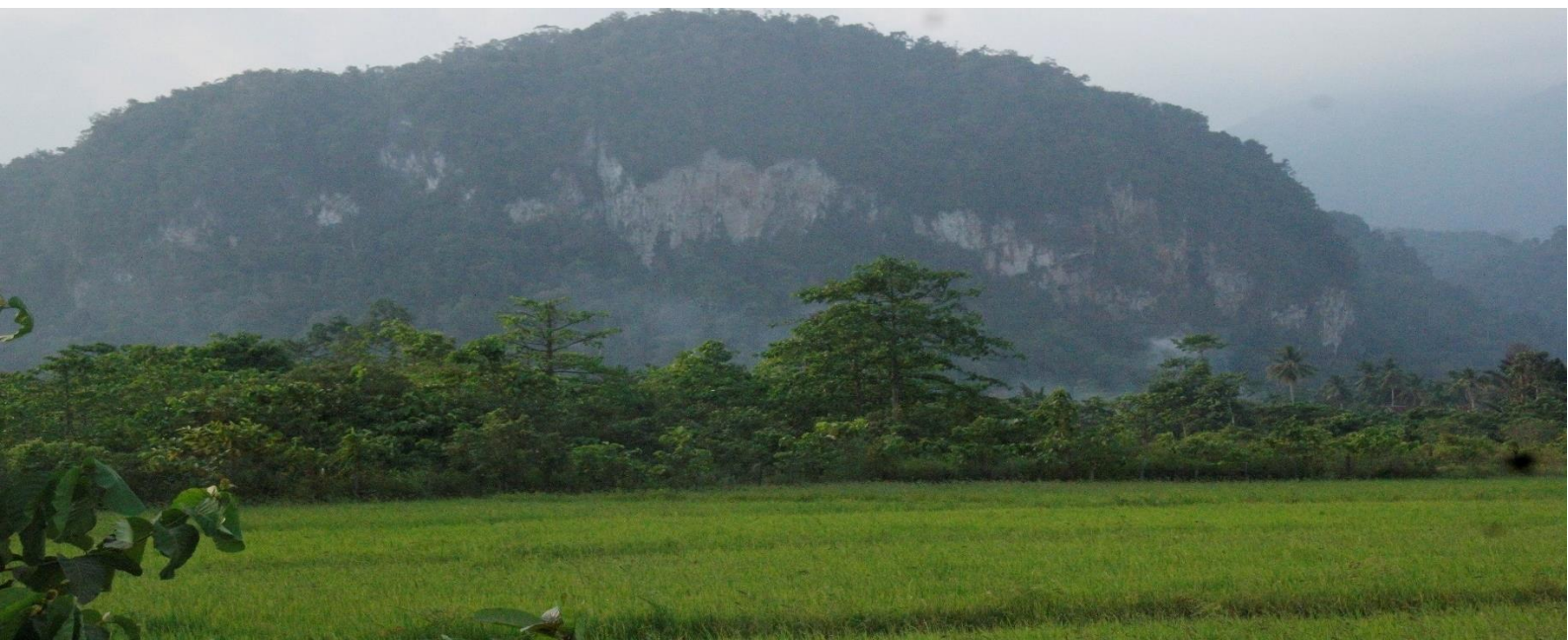
Tarimana (1993) menguraikan dengan jelas persebaran awal Orang Tolaki: Mereka bermula dari Andolaki, dan kemudian terbagi ke berbagai arah; ke utara hingga Rounta, ke barat hingga Kondeeha melalui Mowewe dan Lambo, serta ada yang mencapai Mekongga. Selanjutnya, mereka menyebar ke selatan hingga Olo-Oloho atau Konawe lewat Ambekairi dan Asinua, dan ke timur hingga Latoma dan Asera. Orang Tolaki awal yang menetap di Landono dan Besulutu kemudian menyebar ke wilayah sebelah timur, termasuk wilayah muara Sungai Konawehea dan Sungai Lasolo. Di sebelah selatan, mereka mencakup wilayah Kendari selatan, termasuk Punggaluku, Tinanggea, Kolono, dan Moramo, serta ada yang bahkan menyeberang ke Pulau Wawonii (Pingak, 1963). Orang Tolaki yang mendiami wilayah Kerajaan Mekongga di Kabupaten Kolaka saat ini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Mekong, sebuah narasi sejarah yang dipopulerkan oleh A. Hamid Hasan (1963). Kelompok lainnya yang berada di wilayah Kerajaan Konawe, terutama di bagian wilayah Kabupaten Kendari, dikenal sebagai orang Konawe. Sementara mereka yang tinggal di wilayah pesisir hulu Sungai Konawehea bagian utara Kerajaan Konawe dan bagian utara Kerajaan Mekongga, menyebut diri mereka sebagai orang To Laiwui.

Sebaran Orang Tolaki yang diungkapkan oleh Tarimana, menambah kejelasan tentang keberadaan Orang Tolaki di Tapunggayaya. Dalam melihat salah satu rute sebarannya melalui DAS Konawehea dan DAS Lasolo, dugaan Tim terhadap alur kedatangan orang pertama di Tapunggayaya dinyatakan dengan garis warna hijau dalam gambar di atas. Pada awalnya, kehidupan perkampungan di Blok Mandiodo berkembang di kampung lama, yaitu Desa Tapunggayaya (Lama). Meskipun belum ada kepastian mengenai tahun berdirinya kampung Tapunggayaya (Lama), Sinauri (83 tahun) menceritakan asal-usul nama Tapunggayaya. Dia menyatakan bahwa kata "Tapunggayaya" berasal dari kata "Unggayaya", sebuah kata yang berasal dari Bahasa Bungku (yang digunakan di Sulawesi Tengah) yang menggambarkan perbatasan antara Bungku dan wilayah sebelahnya, yang saat ini merujuk pada wilayah Sulawesi Tenggara. Kata "Unggayaya" diilhami oleh nama buah Kaloba yang melimpah di wilayah tersebut pada masa itu. Dari sini, nama kampung tersebut kemudian berkembang menjadi Tapunggayaya.



*Dok. Tarimana (1993), Gambar 1 : Peta sebaran Orang Tolaki.*

Dari cerita Sinauri, muncul nama Latondoha, seorang pria yang berasal dari Abuki. Karena Latondoha di Abuki tidak memiliki jabatan tertentu, penguasa setempat memerintahkannya untuk pergi dan membuka lahan baru atau perkampungan yang akan dipimpinnya sendiri. Latondoha bersama keluarganya dan sejumlah warga lainnya pun memulai perjalanan melalui jalur darat. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang jumlah warga yang bergabung dalam misi Latondoha membuka perkampungan baru, Sinauri (83 tahun) mengisahkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa keberadaan bangsa Kolonial Belanda di Sulawesi Tenggara. Kemungkinan besar, peristiwa ini terjadi menjelang akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20.





*Dok. Hargono, Gambar 2 : Wawancara dengan Sinauri (83 thn).<sup>4</sup>*

Latondoha dan penduduknya memulai kehidupan baru di Tapunggaya, membuka lahan untuk pertanian dengan menanam padi ladang. Proses pembukaan lahan dimulai dengan menanam padi ladang secara berpindah-pindah. Meskipun belum ada informasi yang pasti mengenai alat atau teknik yang digunakan Latondoha pada masa itu, pembukaan lahan terus berlanjut dengan pengembangan perkebunan, termasuk perkebunan mete dan jenis perkebunan lainnya.

Melacak kehidupan awal di Tapunggaya menjadi suatu tantangan yang sangat sulit. Namun, beberapa catatan dari ingatan Puma (81 tahun) telah berhasil dikumpulkan oleh tim. Saat bertemu dengan Puma, dia menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi di desa itu pada masa mudanya. Di antara catatan-catatan yang disampaikan adalah: pada tahun 1982, dimulai budidaya mutiara yang menyebabkan penurunan populasi ikan di sekitarnya; tahun 1972, Puma menjabat sebagai Wakil Kepala Desa Tapunggaya; pada tahun 1970-1971, masih terdapat subsidi beras sebesar Rp. 200,-; pada tahun 1969, Puma pergi ke Surabaya menggunakan perahu layar; pada tahun 1968-1969, subsidi beras mencapai 1 rupiah; pada tahun 1968, Hasan menjabat sebagai Kepala Desa Tapunggaya;

---

<sup>4</sup> Wawancara ini dilakukan salah satu peneliti lokal sekaligus informan dari Tim, Hargono. Karena keterbatasan waktu, dan jarak tempuh ke lokasi riset. Tim mengarahkan dan meminta tolong kepada Hargono agar dapat menemui salah seorang informan penting dalam sejarah kampung di Blok Mandiodo. Sinauri (81 thn) adalah sosok perempuan yang paham dan paling tua di kampung tersebut.

tahun 1955, diadakan pemilihan umum; tahun 1956, masuk PDK (Pasukan Djihad Konawe); dan pada tahun 1949, berdiri sekolah Partikelir di daerah tersebut.



*Dok. Tim, Gambar 3 : Wawancara dengan Puma (81 thn).*

Dari catatan Puma di Tapunggaya, dapat dipastikan bahwa dia lahir di Tapunggaya (Lama) pada tahun 1943. Hal ini menunjukkan bahwa kampung ini sudah ada sejak awal tahun 1940-an, bahkan mungkin jauh sebelumnya. Data ini menjadi petunjuk terdekat dalam pelacakan sejarah oleh tim. Kampung Tapunggaya telah ada sebelum kedatangan Jepang. Lokasinya terletak di seberang Sungai Lasolo. Meskipun kampung lama ini tidak terlalu jauh dari pantai, namun memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit. Kampung tersebut menghadap ke laut, sementara sekelilingnya masih ditutupi oleh hutan. Belum ada informasi yang pasti mengenai seberapa luas tanah yang dimiliki oleh penduduk kampung pada masa itu.

Warga Tapunggaya umumnya mengonsumsi umbi-umbian, sagu, dan mereka sangat bergantung pada sumber daya laut untuk kelangsungan hidup mereka. Meskipun rumah-rumah mereka tidak secara langsung berada di tepi pantai, berbeda dengan orang Bajo yang kampungnya terletak di pesisir pantai, namun jarak antara kampung Tapunggaya (Lama) dan pesisir tidak terlalu jauh. Sejak awal berdirinya, kampung Tapunggaya (Lama) sudah menjadi tempat tinggal bagi masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Mayoritas penduduk kampung berasal dari etnis Tolaki dan Bajo, sementara ada juga pendatang dari Sulawesi Tengah yang dikenal dengan sebutan etnis Bungku.

Kehidupan sehari-hari di Tapunggaya (Lama) melibatkan berbagai aktivitas ekonomi seperti bertani, mengolah kopra (yang dijual ke Surabaya), membuat anyaman tikar dari

daun dan kulit rotan, mengumpulkan rotan (yang oleh orang Tolaki disebut marotan, dan dijual ke Surabaya), serta membuat atap dari daun (biasanya menggunakan daun sagu). Selain itu, penduduk juga membelah kayu untuk keperluan kayu bakar dan dijual ke Kota Kendari dengan menggunakan perahu. Namun, berbagai aktivitas ini terhenti mendadak akibat wabah penyakit yang menyebar di tengah kampung, mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pada sekitar tahun 1992, terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan wabah penyakit di Tapunggaya. Menurut beberapa warga yang telah diwawancarai, wabah ini adalah wabah sakit perut yang sangat mematikan. Setiap harinya, wabah ini menyebabkan kematian 4-6 orang warga, dan kejadian ini berlangsung selama beberapa bulan. Karena tidak mampu mengatasi wabah tersebut, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk merelokasi sekitar 100 kepala keluarga. Awalnya, warga enggan meninggalkan kampung mereka, mereka mempunyai keyakinan bersama bahwa "lebih baik meninggal di kampung sendiri daripada di kampung orang". Namun, pemerintah bersama TNI AD akhirnya mengambil tindakan paksa dengan cara membakar rumah-rumah warga.

Setelah rumah-rumah mereka terbakar, warga tidak memiliki pilihan selain untuk pindah ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lokasi relokasi perkampungan ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari kampung lama, masih berada pada daratan yang sama, dengan Sungai Lasolo sebagai pemisah antara kampung lama dan kampung baru. Di wilayah relokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, setiap kepala keluarga diberikan dua lahan: satu untuk tempat tinggal dan yang lainnya untuk bercocok tanam. Setiap lahan memiliki lebar 50 meter dan panjang 400 meter, setara dengan 2 hektar. Dengan demikian, total luas lahan yang diberikan oleh pemerintah, yang pada saat itu diberi nama bantuan PMD, adalah 2 hektar per kepala keluarga, dikalikan dengan jumlah kepala keluarga, yaitu 200, sehingga total luas lahan yang disediakan mencapai 200 hektar.

Keberadaan pertambangan di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan Kecamatan Molawe kabupaten Konawe Utaramenjadi fokus yang tepat berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Hal ini didasarkan atas kondisi kerusakan lingkungan yang parah dan rentan untuk kelangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat di sekitar

tambang. beberapa fokus utama dalam investigasi ini adalah masalah kebijakan, tata ruang, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Utamanya ketika masyarakat tidak lagi bisa beradaptasi dengan alamnya untuk melakukan aktivitas pertanian dan perikanan (petani dan nelayan), seperti; budidaya terumbu karang, teripang, udang dan ikan tangkapan. Kenyataan diatas, sangat kontras sebelum ada kerusakan lingkungan, dimana hasil produksi pertanian dan perikanan sangat memuaskan.

Masalah banjir ini terjadi karena kali pesouha tertutup dan membawa limbah material dari gunung, kayu-kayu tegakkan habis, penggundulan hutan sehingga terjadi erosi, di desa ini pula tidak pernah sepi dari debu limbah ini menjadi menu sehari-hari, belum lagi penggunaan jalan umum untuk jalan produksi perusahaan tambang, jalan-jalan umum disini sudah rusak parah dan pemerintah menurut informasi tidak menjadikan prioritas pembangunan jalan di desa Tapunggaeya, berikut penuturan Kades Tapunggaeya - Jumrin Asri ;“ Desa Tapunggaeya terdapat banyak KP/IUP yang beroperasi; PT. BKM, PT. Cinta jaya, PT. Sriwijaya, PT. Antam. Tbk, PT. Arita (belum operasi).

Sejak ada aktivitas tambang, disini rawan longsor, dan setiap kali hujan pasti banjir karena banyak tutupan anak kali sehingga tersumbat oleh materil, air banjir langsung menjulur ke laut, itulah sehingga warna laut berubah menjadi merah bila hujan, belum lagi debu menjadi pemandangan sehari-hari yang dirasakan warga. Yang paling memprihatinkan adalah adanya fasilitas umum (SD dan SMP yang di kelilingi ore dan jalan umum di jadikan jalan produksi tambang, bila tambang beroperasi siswa dan tenaga pengajar terganggu karena terlalu bising, sehingga pernah guru-guru melakukan demo di kantor DPRD Konawe Utara, namun hasilnya PT. Sriwijaya hanya memberikan insentif guru, bantuan horden sekolah dan pakaian sekolah untuk siswa.

Padahal masyarakat dan guru meminta untuk menghentikan aktivitas disekitar sekolah, selain karena gangguan kendaraan juga ada faktor debu. Perusahaan ini tidak pernah melibatkan dinas kesehatan untuk memeriksa kesehatan siswa dan masyarakat sekitar, malah PT. Sriwijaya berupaya ingin memindahkan sekolah SD dan SMP yang merupakan milik Negara dan milik publik. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak mau diatur oleh pemerintah setempat, tidak mau membuat cekdam. PT. sriwijaya memiliki izin sejak tahun 2007, dan setiap bulan melakukan pengapalan.

Untuk kontribusi dan bantuan sosial PT.Cinta Jaya memberikan bantuan sosial (mesin lampu kapasitas besar) dan Antam memberi bantuan sosial lainnya, Sementara PT. BKM melakukan pengapalan setiap minggu tidak pernah ada kontribusi. Atas keberadaan tambang di desa kami, mayoritas penduduk yang berlatar belakang nelayan dan tani (213KK/906 jiwa), saat ini hanya menjadi buruh upahan di perusahaan tambang dengan gaji yang mudah, hal ini dilakukan karena mereka jika melaut hasilnya tidak seperti dulu lagi, dimana masyarakat Tapunggaeya dan sekitarnya adalah penghasil ikan sekarang malah menunggu penjual ikan motor dan orang sini jadi pembeli. Dulu bagang banyak, sekarang tinggal 1 dan kelompok nelayan tertinggal hanya 4 saja, itupun jarang turun melaut dan walaupun melaut jarak tangkapan sudah cukup jauh. Kalau Desa Tapunggaeya tidak masuk kawasan kecuali antara batas Mandiodo dan desa Puusuli itu menurut informasi masuk kawasan hutan, sementara, Desa Mandiodo dan Mowundo sebagai desa binaan program Depsos RI,”.

Karena keterbatasan yang dimiliki maka investigasi ini dibatasi pada pemegang IUP yang disebutkan diatas. Dengan alasan sbb :

1. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan diatas, menjadi refresentasi dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, dilihat dari sisi perspektif praktek penambangan.
2. Sebagian besar perusahaan yang disebutkan sampai saat ini sudah, sedang dan akan terus melakukan eksploitasi pada lokasi yang dimaksud, dan telah mewakili tipologi perusahaan ekstraktif.

Pada saat yang sama para pemegang IUP melakukan penambangan tanpa kendali, sehingga menimbulkan eksese sosial ekonomi, sosial budaya dan daya rusak lingkungan yang dahsyat, seperti; pencemaran air, kehancuran hutan, hewan dan biota perairan, bencana banjir, kehancuran sistem hidrologi dan penurunan kualitas udara. Keseluruhan hasil investigasi ini, diharapkan dapat menampilkan sekilas tentang dampak dan fenomena pengelolaan tambang di Sulawesi Tenggara secara umum.

Sejumlah Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, rawan terhadap pelanggaran hukum utamanya bagi pemegang IUP yang nekat memasuki penambangan diareal kawasan hutan, pada kondisi ini pula fungsi pengawasan terhadap pengendalian dampak lingkungan tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga perusahaan yang beroperasi leluasa dan tanpa kendali.

Hal ini dapat dilihat dari perangkat kelembagaan dan pelanggaran legalitas hukum yakni :

*1) tidak patuh*

Pada semua wilayah yang menjadi lokasi investigasi dan hasil analisis AMDAL tidak memiliki devisi amdal dalam struktur kerja operasional eksploitasi pertambangan.

*2) Ketenagakerjaan*

Perekrutan tenaga kerja dan jaminan ketenagakerjaan tidak memperhatikan sevetee prosudure.

## **B. Hasil Penelitian**

### **3.2. Kehilangan AHOMA - Rusaknya Biodiversitas dan Hilangnya Kearifan Lokal .**

AHOMA, Merupakan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat local yang mendiami blok mandiodo, khususnya mereka yang bersuku tolaki, selain itu AHOMA juga menjadi sumber pengetahuan dan kebudayaan mereka. Sebagaimana Orang Bajo menggantungkan hidupnya pada laut, demikian pula Orang Tolaki pada AHOMA. Namun, di Blok Mandiodo, tradisi mengambil rotan, madu, dedaunan untuk membuat tikar, dan mencari umbi-umbian hutan telah sirna. Ahoma yang dulu memberi sumber kehidupan, kini tergantikan oleh tanah coklat yang berbukit-bukit dan lubang-lubang raksasa. Mayoritas warga beralih profesi dan kebiasaan mereka karena bekerja untuk perusahaan tambang, menghilangkan kekhasan budaya mereka.

“Dampak dari hadirnya tambang terasa langsung bagi nelayan setempat. Haris, seorang nelayan dari Kelurahan Molawe, mengungkapkan bahwa sejak kehadiran tambang, ikan-ikan mulai menjauh dari perairan sekitar. Hal ini memaksa nelayan untuk melaut lebih jauh guna menangkap hasil yang lebih baik. Namun, tantangan ini hanya bisa diatasi oleh nelayan yang memiliki kapal besar dan mesin berkapasitas besar. Bagi nelayan dengan perahu layar atau menggunakan mesin tempel, kemampuan untuk melaut jauh menjadi terbatas.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Haris, Kel. Molawe, 10 Nov 2023

Hasil wawancara dengan Masyarakat di Desa Tapungaya mengatakan bahwa “Pada tahun 2021, di dalam wilayah konsesi salah satu perusahaan tambang nikel PT.BKM tepatnya di titik bor Perusahaan, pernah terjebak salah satu hewan endemic Sulawesi (Anoa) hewan endemic tersebut terjebak di salah satu lubang yang telah di gali oleh PT.BKM. pekerja yang melihat tersebut kemudian memanggil warga untuk membantu mengangkat hewan tersebut dari lubang bor dan pada akhirnya hewan tersebut berakhir di bunuh oleh warga dan karyawan Perusahaan karena di anggap dapat membahayakan mereka”.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan aktivitas pertambangan nikel yang begitu massif di wilayah tersebut telah merusak habitat anoa di pegunungan mandiodo, sehingga membuat hewan endemic tersebut harus keluar dari persembunyiannya. Ancaman bagi hewan endemic ini begitu nyata dan tentunya ini dapat menyebabkan punahnya hewan endemic Sulawesi tersebut.



**Gambar 4 : Kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan Masyarakat dan Habitat Anoa**  
**Sumber : Dokumentasi Tim Puspaham 2023**

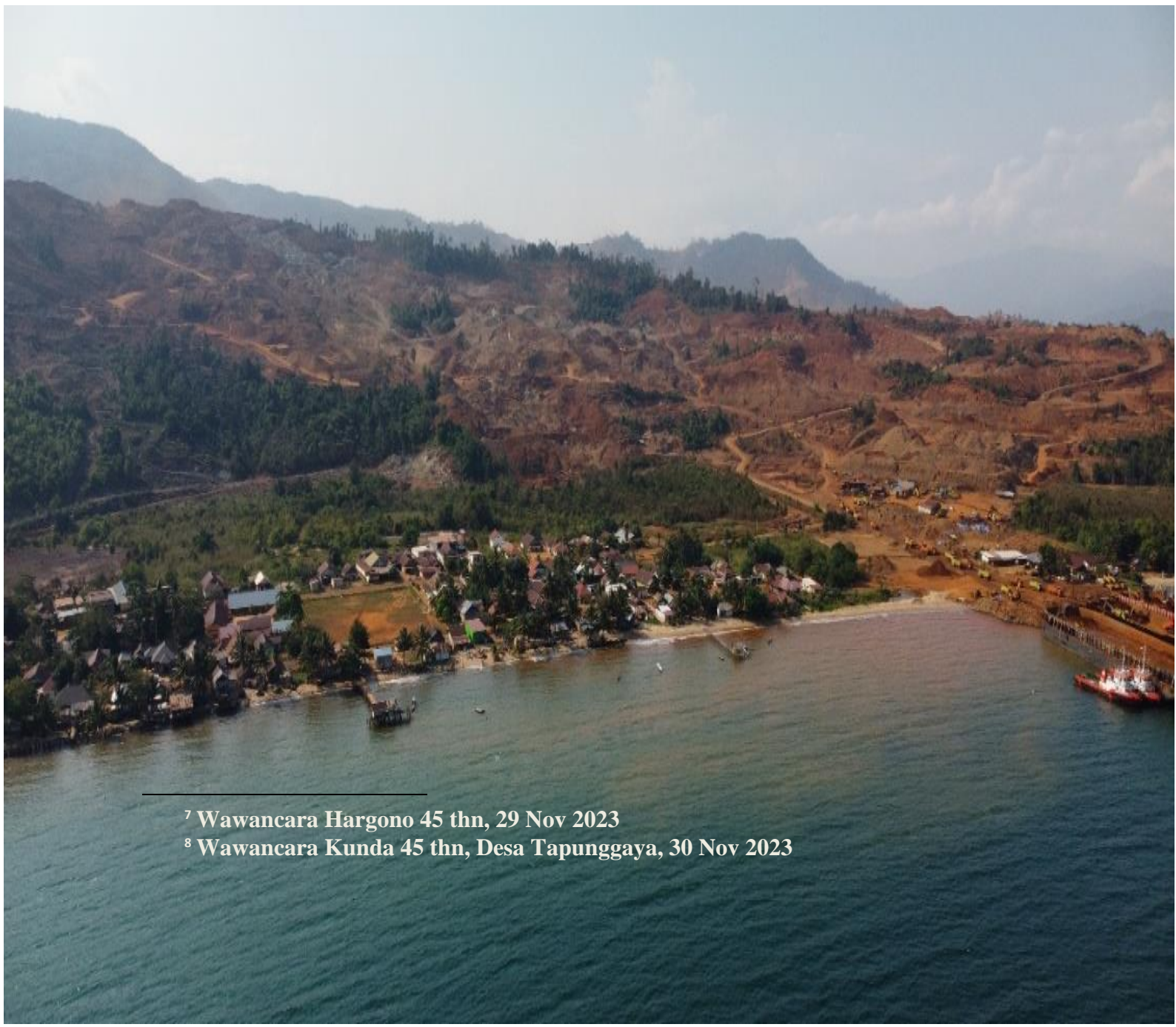
Kehadiran tambang nikel di blok mandiodo membawah dampak negatif yang sangat signifikan terhadap hutan, laut dan Sungai yang selama ini dijadikan sebagai sumber penghidupan Masyarakat, hal dapat di konfirmasi langsung dengan wawancara tim kepada salah satu warga di desa tapuemea.

---

<sup>6</sup> Wawancara warga Desa Tapungaya 27 Nov 2023.

*"Pada masa lalu, burung maleo sering kali terlihat menjelajahi sepanjang pesisir pantai di desa ini. Namun, seiring dengan ramainya kedatangan orang-orang yang bekerja di sini, keberadaan burung-burung tersebut tampaknya telah berpindah ke Pulau Bahubulu. Hal ini mencerminkan perubahan lingkungan dan pola migrasi satwa liar sebagai dampak dari aktivitas manusia yang semakin meningkat di wilayah tersebut."*<sup>7</sup>

*Selani itu, Sebelum hadirnya tambang, buaya-buaya lebih banyak terlihat di sungai, sedang di muara (DAS Lasolo) tidak terlalu banyak. Tapi, sejak keruhnya air sungai, buaya semakin banyak di muara, bahkan biasa terlihat di belakang rumah warga. Belum cukup seminggu, nelayan di sini ada yang digigit tangannya sama buaya saat menarik jaring ikannya, untungnya masih bisa selamat."*<sup>8</sup>



---

<sup>7</sup> Wawancara Hargono 45 thn, 29 Nov 2023

<sup>8</sup> Wawancara Kunda 45 thn, Desa Tapunggaya, 30 Nov 2023

Dalam mengamatan tim riset dilapangan, selama dua minggu tim sangat terkejut dan prihatin melihat kondisi lingkungan di blok mandiodo yang begitu menghawatirkan bagi kehidupan Masyarakat. Selama Tim berada di lingkungan tambang, belum pernah terlihat keberadaan burung elang, burung maleo, burung julang Sulawesi, Monyet, atau kadalan Sulawesi (yang merupakan spesies endemik Sulawesi), juga belum pernah melihat monyet. Menurut pengakuan warga setempat, di masa lalu, burung elang sering terlihat mengelilingi perkampungan, kadang-kadang mengincar anak ayam. Namun, kini kehadiran mereka jarang terlihat lagi, mungkin karena keberadaan pohon-pohon besar tempat mereka bertengger telah berkurang di sekitar kampung. Hal serupa juga dialami oleh burung maleo, yang dulunya sering terlihat berjalan di sepanjang pesisir pantai dan bertelur di atas pasir putih. Namun, belakangan ini, nelayan yang melintasi pulau Bahulu melaporkan bahwa burung-burung maleo kini lebih sering terlihat di pesisir pantai pulau tersebut. Perubahan ini mencerminkan dampak dari perubahan lingkungan akibat aktivitas tambang yang semakin meluas di daerah tersebut.

Selain itu, beberapa flora atau tumbuhan juga telah hilang dari wilayah perkampungan, seperti anggrek serat yang dalam bahasa lokal disebut sebagai anomi, anemi, atau alemi. Anggrek serat ini biasanya digunakan sebagai bahan dalam kerajinan tangan, seperti pembuatan songkok, yang merupakan topi khas Tolaki. Songkok tersebut, yang oleh orang Tolaki disebut sebagai songkok sorume, banyak dipakai oleh tokoh adat, pejabat setempat, dan warga yang mampu membelinya, mengingat harganya yang mencapai sekitar Rp.700.000,- di pasaran, tergantung pada tingkat kerapian dan kerumitan motif yang dibuat. Salah satu pohon yang sulit dikenali kini adalah pohon kaloba, yang diperkirakan telah hilang karena tergerusnya hutan yang menjadi konsesi tambang atau akibat aktivitas penambangan liar oleh beberapa perusahaan tambang. Pohon kaloba, sebagaimana disebutkan sebelumnya, menjadi asal nama kampung Tapunggay. Nama kampung ini diambil dari pohon kaloba karena pada masa lalu, pohon tersebut banyak ditemui di sekitarnya. Sampai saat ini, Tim belum dapat menjelajahi lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti flora dan fauna mana saja yang telah terpinggirkan akibat eksplorasi tambang yang semakin meluas.

Di wilayah Blok Mandiodo, kebiasaan mengumpulkan rotan atau yang dikenal sebagai "marotan" sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini disebabkan oleh hilangnya wilayah yang dulunya menjadi tempat utama untuk mengambil rotan. Padahal, pada masa lalu, pekerjaan mengumpulkan rotan ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan

yang cukup baik. Beberapa dekade yang lalu, Puma adalah salah satu dari mereka yang menjual rotan hingga ke Kota Surabaya dengan menggunakan kapal layar, (mungkin kapal berukuran sekitar 25 GT, atau kapal tradisional seperti Lambo dan Phinisi).

Deforestasi masif untuk tambang dimulai sejak tahun 2011. Menurut investigasi Tempo, izin usaha pertambangan awalnya diperoleh untuk Blok Mandiodo seluas 3.400 hektar, yang kemudian dimenangkan oleh Antam dalam proses hukum di Mahkamah Agung, dengan luas konsesi 16.000 hektar. Pengelolaan hak konsesi ini menjadi sumber perselisihan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Peta tahun 2010, dalam peta tersebut dikatakan terlihat ada 7 perusahaan yang memiliki IUP, yakni:

1. PT. Aneka Tambang Tbk (PT. Indonesia Asahan Aluminium dan warga, Luas 16.920 ha, nikel)<sup>9</sup>;
2. PT. Bumi Konawe Menerina (Aquila Mine PTE LTD dan Mahawira Palasara Agung, 616 ha, nikel);
3. PT. Cinta Jaya (Nasni Yunus Kadir, Wahyuni Yunus Kadir, Cahyani Yunus Kadir, Yunan Yunus Kadir, Yupani Yunus Kadir dan Bagus Bhirawa Putra, 309 ha, nikel);
4. PT. Kabaena Kronit Prathama<sup>10</sup> (102,6 ha berada di wilayah APL Mandiodo, nikel);
5. PT. Sriwijaya Raya (PT. HONGWEI INTERNATIONAL dan PT. JAYA LESTARI MINERAL, Operasi Angkut Muat, Mineral logam);
6. PT. Sultra Sarana Bumi<sup>11</sup> (2630 ha, nikel);
7. PT. Sarana Logam Unggul<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Di wilayah Konawe Utara, PT. Antam memiliki 2 IUP dengan luasan yang berbeda. Angka luas area yang dicantumkan Tempo 16.000, ada selisih 920 hektare dengan data di luar Tempo.

<sup>10</sup> Walaupun sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilik dari perusahaan tersebut adalah Andi Sumangerukka yang sebelumnya perusahaan ini sempat dipimpin langsung oleh Andi Adi Ashar (keponakan Andi Sumangerukka) kemudian konon ada konflik internal antara Andi Sumangerukka dengan Andi Adi Ashar sehingga posisi direktur digantikan dengan Andi Ardiansyah. Alamat perusahaan sesuai tampilan dalam MODI adalah Graha Asri EE NO. 10 Kel. Watulondo, Kendari Sulawesi Tenggara.

<sup>11</sup> Pengecekan Nov 2023, sehingga mungkin ada perubahan yang Tim tidak menemukan pemegang saham atau pemilik dalam MODI, namun ada susunan direksi untuk Direktur Utama Dadang Yogi Barata dan Komisaris Gunawan Pamungkas.

<sup>12</sup> Pengecekan pada Nov 2023 Sehingga pada Perusahaan PT. Sarana Logam Unggul, jadi sudah tidak terdaftar dalam MODI, ada kemungkinan perusahaan tersebut sudah tidak memperpanjang IUP. Dalam pencarian melalui google, tercatat bahwa perusahaan PT. Panasia Indo Resources TBK adalah pemegang saham sebesar 55% dari PT. Sarana Logam Unggul. Hal ini dapat dicek kembali dalam link: <https://www.idnfinancials.com/id/hdtx/pt-panasia-indo-resources-tbk#shareholders>.

Deforestasi yang terjadi hingga belakang rumah-rumah penduduk di Desa Mandiodo, Desa Tapuemea, dan Desa Tapunggaya merupakan sebuah tragedi. Di Desa Mowundo, situasinya sedikit berbeda dengan adanya jarak yang relatif aman. Namun, belum jelas mengapa lahan-lahan milik warga dijual hingga berbatasan dengan pemukiman. Menurut Hargono, warga memiliki kekhawatiran bahwa perusahaan tambang akan meminta lahan mereka untuk diolah.

Saat Tim mengunjungi wilayah Jetty PT. Cinta Jaya bersama Hargono, salah seorang pegawai PT. Cinta Jaya didengar sedang berbicara dengan seorang pegawai lainnya.

*“Bos dia sampaikan kalo akan mengolah lahannya, bagaimana dengan masyarakat, karena perlu secepatnya diatur (Mandiodo, 28 Nob 2023).”*

Hingga saat ini, Tim belum bisa memverifikasi pembicaraan yang terdengar secara singkat saat mereka, bersama Hargono dan para pegawai PT. Cinta Jaya, duduk bersama di salah satu ruangan kantor perusahaan. Kehadiran Tim hanya sebatas diajak jalan-jalan oleh Hargono, yang kebetulan membawa sebuah lembar perijinan kapal tongkang untuk berlabuh.

Tim menduga bahwa pembicaraan antara Hargono dan salah satu staf perusahaan tersebut mungkin berhubungan dengan lokasi tanah yang masih memiliki pepohonan, terutama yang berada di sepanjang belakang rumah penduduk di Desa Tapuemea dan Desa Tapunggaya, dan mungkin juga termasuk di Desa Mandiodo (lihat gambar 6).

Hilangnya ahoma bukan hanya berarti kehilangan sumber kehidupan bagi Orang Tolaki, tetapi juga berarti kehilangan kepemilikan mereka. Menurut catatan Tarimana (1993), berbagai area seperti ana homa (ladang), o galu (sawah), o epe (tempat tumbuhnya pohon sagu), walaka (tempat melepaskan kerbau), lokua (tempat berburu), arano atau pinokotei (rawa dan tepi sungai untuk menangkap ikan), pombahora (tempat berkubur leluhur dan pekarangan yang ditinggalkan), serta waworaha (perkebunan jangka panjang), semuanya dianggap sebagai tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu keluarga menurut hukum adat pertanahan Orang Tolaki, baik karena mereka secara langsung mengolahnya maupun karena merupakan warisan turun-temurun.

Dengan adanya perubahan lanskap dari area perkebunan menjadi area pertambangan, pola mata pencaharian warga, budaya setempat, dan banyak hal lainnya mengalami

perubahan drastis. Awalnya, warga bekerja sebagai petani atau nelayan, namun kini mereka beralih profesi menjadi pengusaha indekos, pedagang, penyedia jasa cuci pakaian, atau bahkan menjadi karyawan perusahaan tambang. Peralihan mata pencaharian ini tidak selalu dianggap sebagai perbaikan hidup bagi warga, melainkan juga membawa kesulitan baru bagi petani yang kurang modal untuk membuka usaha baru atau bagi nelayan yang tidak memiliki alternatif mata pencaharian lain.

Proses penambangan nikel telah memaksa warga untuk mengubah mata pencaharian tradisional mereka atau bahkan pindah ke daerah lain, atau terpaksa menjadi buruh tambang. Selain itu, aktivitas pertambangan nikel juga menyebabkan pencemaran air dan udara, pengurangan luas tutupan hutan dan laut, serta penurunan indeks keanekaragaman hayati. Dampak ini berpotensi mengancam kesehatan manusia.

Wilayah Sungai Lasolo-Konaweha memiliki pantai dengan panjang sekitar 352,6 km yang meliputi 3 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, dan sebagian Kota Kendari. Sekitar 18,5% dari pantai tersebut mengalami kerusakan baik itu ringan, sedang, maupun berat akibat abrasi pantai. Namun, hanya sekitar 8,2% dari kerusakan tersebut yang telah ditangani melalui pembangunan tembok laut maupun krib sejajar pantai, sementara sisanya belum teratasi (BPDAS Sultra, 2012).

Dalam pertemuan dengan salah satu staf pegawai BPDAS Sultra, disampaikan bahwa DAS Lasolo saat ini sedang dalam proses pemulihan. DAS Lasolo memiliki peran penting karena merupakan DAS utama yang mengalirkan banyak sub-DAS lainnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar sub-DAS yang teraliri dari DAS Lasolo juga mengalami penurunan kualitas air atau tercemar akibat aktivitas pertambangan.

Menurut nelayan Bajo yang kami temui, sebelum adanya aktivitas pertambangan, sungai belum terlalu keruh, dan buaya-buaya masih banyak ditemukan di sungai, terutama jauh dari muara. Namun, saat ini, buaya lebih sering terlihat di muara sungai daripada sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu nelayan hampir menjadi korban buaya saat menarik jaring pukatnya. Dugaan muncul bahwa buaya-buaya ini beralih ke muara sungai karena kesulitan mencari makanan akibat keruhnya air sungai. Sebagian nelayan bahkan melaporkan bahwa buaya sering kali terlihat di wilayah pesisir perkampungan

nelayan Bajo, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya sebelum adanya aktivitas tambang.

Meskipun demikian, pihak aparat desa belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman bencana alam. Menurut laporan Kecamatan Molawe Dalam Angka 2023, kesembilan desa yang termasuk dalam kecamatan tersebut belum memiliki fasilitas atau upaya mitigasi bencana alam yang memadai pada tahun 2022. Ketidaksiapan aparat desa ini menjadi permasalahan tersendiri. Meskipun data laporan dari pihak pemerintah kecamatan menyatakan bahwa tidak ada bencana alam yang terjadi di desa-desa tersebut, pemberitaan pada bulan Desember 2022 di berbagai media online menyebutkan bahwa Desa Tapunggaya, Desa Tapuemea, dan Desa Mandiodo mengalami banjir dan kiriman lumpur akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan pemukiman warga yang menyumbang sekitar 60% dari total penduduk di daerah tersebut. Ternyata, dalam pelaporan industri dan pertambangan golongan tipe A di Kecamatan Molawe Dalam Angka 2023, terungkap bahwa yang ada adalah pelaporan industri dan pertambangan golongan tipe C.



### **3.3 Pertambangan : Kerusakan Lingkungan, Kesehatan, Ekonomi dan Korupsi SDA**

#### **A. Kerusakan Lingkungan**

Keberadaan industri ekstra aktif pertambangan di Konawe Utara, tidak terlepas dari kerusakan lingkungan, saat ini puluhan IUP dan sejumlah kontraktor mining tambang masif melakukan aktifitas eksploitasi salah satunya berada di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, antara lain; PT. Sriwijaya, PT. BKM, PT. Antam Tbk, PT. Cinta Jaya, dan terdapat sejumlah IUP dan puluhan kontraktor mining. Pengelolaan tambang tersebut menimbulkan berbagai dampak kerusakan lingkungan dan pelanggaran aturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

##### **1) *Pencemaran Air***

Aktivitas pertambangan nikel di Blok Mandiodo telah membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di lingkaran tambang yaitu pencemaran sungai, laut maupun sumber air bersih masyarakat.

Pembuatan jalan penghubung dan jalan tambang menyebabkan limpahan air permukaan yang diakibatkan oleh hujan menjadi lebih besar dan aliran permukaan membawa material erosi dan sedimentasi yang terjadi. Belum lagi pencemaran DAS Lasolo di Kecamatan Molawe; Desa Tapunggaeya, Tapumea, Mandiodo dan Mowundo. Dimana sejumlah aktivitas pertambangan dilakukan di sepanjang DAS dan pesisir teluk Lasolo.

Aktivitas sejumlah perusahaan tambang diatas, memberi dampak langsung pada masyarakat, dan petani/nelayan. Berbagai upaya protes masyarakat dilakukan mulai dengan cara aksi jalanan, protes terhadap kerusakan lingkungan pada instansi berwenang.

##### **2) *Hancurannya Hutan dan keanekaragaman Hayati***

Pembersihan lahan menyebabkan hancurnya vegetasi hutan yang selama ini menjadi tempat hidup beberapa jenis satwa penting yang bersifat endemik, langka dan hampir puna seperti rusak dan anoa, sumber pangan lainnya seperti rotan, damar, jamur dan berbagai sumber tumbuhan, pangan produktif lainnya,

termasuk hilangnya hutan primer dan sekunder yang berfungsi penting dalam pengendalian aliran permukaan darat yang menjolok ke laut sebagai daerah tangkapan air dan habitat satwa liar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat (petani/nelayan) kehilangan mata pencaharian seperti kebiasaan melaut atau mencari ikan di sungai, hal ini tidak dapat dihitung secara ekonomi dan hingga kini belum ada pemulihan berbagai dampak lingkungan tersebut.

### **3) *Rusaknya DAS dan Bencana Banjir***

Aktivitas pertambangan nikel merubah kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air menjadi daerah pertambangan yang terbuka. Akibatnya pada saat musim penghujan, debit air tinggi sementara daerah tangkapan air sudah hilang menjadi areal pertambangan, pada akhirnya akan terjadi limpasan air karena tidak dapat menampung air hujan, yang terjadi limbah lumpur dan sedimentasi langsung masuk di pemukiman dan berakhir di laut/sungai. Banjir yang sering terjadi sekitar tambang, diakibatkan rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di sepanjang kawasan hutan di **mandiodo** dan sejumlah sungai kecil yang terdapat dalam kawasan dan membelah kawasan pemukiman.

### **4) *Penurunan Kualitas Udara***

Aktivitas produksi yang terjadi disekitar areal pertambangan dari kejauhan terlihat kepulan debu tebal terlepas ke udara bebas. Pengamatan langsung dilakukan dilokasi. Meski fakta ini ditemukan, namun secara pasti dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan warga secara detail belum dilakukan. Penggalian dan penimbunan, pengangkutan ore nikel yang melewati jalan-jalan umum, mengalami rusak berat. Menimbulkan peningkatan konsentrasi debu yang menurunkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang ada disekitar tambang, terutama terhadap penyakit-penyakit saluran pernapasan, pada puncaknya debu ini semakin tidak terkendali utamanya pada musim kemarau.

### **5) *Pembangunan Jety***

Pembangunan Jety di laut dengan panjang lintasan 1,8 KM dari pinggir pantai telah menyebabkan kerusakan ekosistem biota perairan dan semakin

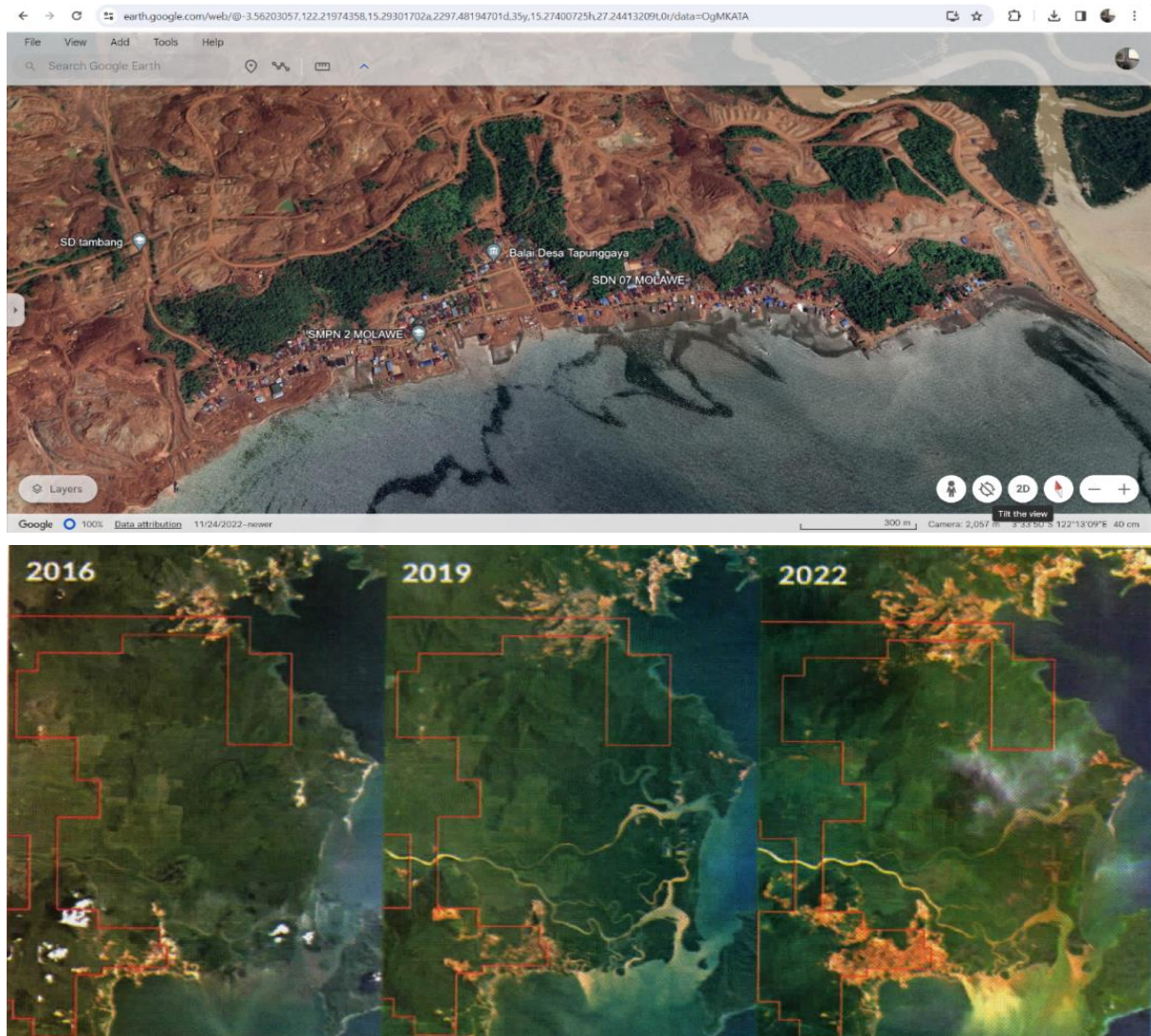
meningkatnya sedimentasi/lumpur, perusahaan juga kerap menyimpan stok ore nikel dipinggir laut untuk diangkut ke kapal tongkang.

#### **6) *Penggusuran Fasilitas Pendidikan***

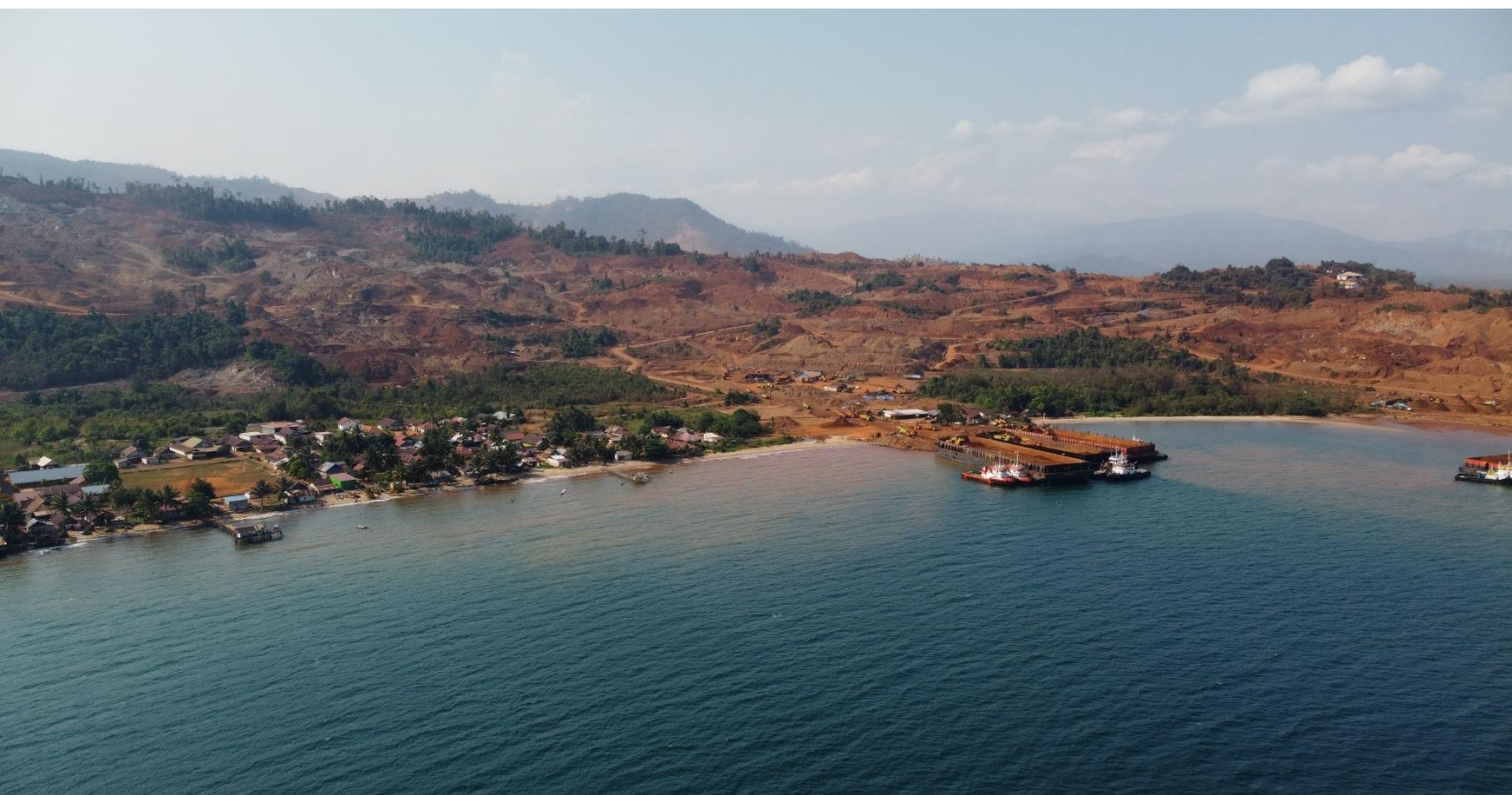
Dalam operasi tambang di Blok Mandiodo telah merelokasi Gedung sekolah SD, SMP dan SMK Kelautan Konawe Utara. Kondisi ini mengkonfirmasi betapa operasi tambang memiliki daya paksa baik terhadap fasilitas negara maupun dalam penggunaan kawasan, utamanya dalam penambangan ilegal seperti yang terjadi di daerah ini. Padahal baik Masyarakat maupun tenaga pengajar telah melakukan protes berulang kali, karena mengganggu proses belajar mengajar terganggu dan menurunkan prestasi siswa, para pengelola sekolah dan masyarakat telah melakukan upaya penolakan dan pelarangan untuk tidak melewati jalan umum menjadi jalan produksi, dan menampung ore nikel di sekitar sekolah atau fasilitas umum lainnya.



***Gambar. 5 : Kondisi jalan dan Blok Mandiodo  
Sumber : Tim Puspaham Sultra 2023***



***Gambar 6 : Perubahan tutupan hutan 3 tahun terakhir di blok mandiodo  
Sumber : Google Earth, di olah oleh tim***



*Gambar. 7 : Kondisi laut yang sudah tercemar, dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan sebelum adanya tambang nikel.*



*Gambar. 9 : Kondisi pesisir laut yang sudah tercemar, dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan sebelum adanya tambang nikel.*

## **B. Kondisi Kesehatan Masyarakat**

Selain menyebabkan deforestasi, erosi tanah, pencemaran air dampak buruk lainnya dari aktivitas pertambangan nikel adalah meningkatnya polusi udara, hal ini disebabkan proses Produksi nikel sering kali menghasilkan gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Emisi gas-gas ini dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara lokal, yang berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Partikel-partikel berbahaya yang terhirup dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan bahkan penyakit serius seperti kanker.

Data yang berhasil di dapatkan dari Puskesmas Tapungaya, Kec. Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Menunjukkan tren penyakit Ispa dan diare meningkat hal ini

tentu ada kegiatannya dengan aktivitas pertambangan nikel yang terjadi di blok mandiodo.

Adapun 10 penyakit yang tercantum dalam daftar Laporan Lb1 tahun 2021 dan 2022 yang banyak dialami oleh warga sekitar tambang oleh Tim mendapatkan langsung dari Kapus Tapunggya, Yaitu:

**Tabel. 1 : Daftar Penyakit di Blok mandiodo**  
**Sumber : Laporan Lb1 tahun 2021 Puskesmas Tapunggya**

NO	Nama Penyakit	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Hipertensi	268	372	637
2	Ispa	161	147	308
3	Gastritis	110	160	270
4	Febris	64	105	169
5	Myalgia	65	48	113
6	Dermatitis	58	42	100
7	Malaise	34	62	96
8	Anemia	22	68	90
9	Diare	41	33	74
10	Kecelakaan/Vulnus	46	13	59

**Tabel. 2 : Daftar Penyakit di Blok mandiodo**  
**Sumber : Laporan Lb1 tahun 2022 Puskesmas Tapunggya**

NO	Nama Penyakit	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Hipertensi	98	117	215
2	Febris	87	85	172
3	Ispa	76	95	171
4	Gastritis	81	71	152
5	Diare	63	70	133
6	Common Cold	59	72	131
7	Myalgia	60	70	130
8	Dermatitis	48	34	82
9	Diabetes Melitus	28	34	62
10	Kecelakaan/Vulnus	42	13	55

Data yang di dapatkan terkait penyakit yang di derita oleh Masyarakat di blok mandiodo menunjukan angka penyakit ispa berada di urutan ke 2 tahun 2021 dan penyakit diare berada di urutan ke 5 tahun 2022. Hasil wawancara dengan Masyarakat desa tapunggya

mengatakan bahwa, sejak adanya aktivitas pertambangan nikel Kesehatan Masyarakat terganggu, hal ini tentunya lingkungan dan udara yang begitu buruk membuat Masyarakat khawatir terkait dengan Kesehatan mereka, bahkan untuk keluar rumah pun Masyarakat harus selalu memakai masker, selain itu Masyarakat mengeluhkan terkait sumber air bersih mereka yang di gunakan dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai tercemar bahkan beberapa Masyarakat telah mengalami gatal-gatal.



***Gambar. 8 : Kondisi Puskesmas Tapungaya  
Sumber : Tim Puspaham Sultra 2023***



***Gambar. 9 : Kondisi Lingkungan Masyarakat  
Sumber : Tim Puspaham Sultra 2023***

A black and white photograph showing a large, dense pile of small fish, likely sardines or anchovies, caught in a fishing net. The fish are piled together, filling most of the frame. The net is made of a fine mesh and is draped over a structure, possibly part of a boat or a fishing platform. The background is dark and indistinct, focusing attention on the fish.

**TRANSFORMASI EKONOMI  
MASYARAKAT DARI LAUT KE  
TAMBANG**

### **C. Trasformasi Ekonomi Masyarakat dari laut ke Tambang**

Jauh sebelum perusahaan tambang tiba, sebagian besar penduduk di desa-desa sekitar wilayah tambang adalah nelayan yang sangat produktif. Mereka menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut, seperti ikan, kepiting, udang, dan berbagai spesies laut lainnya.

Pesisir pantai yang kaya akan mangrove di masa lalu merupakan tempat yang melimpah bagi kepiting bakau dan kepiting rajungan, yang hidup di antara pasir putih. Selain itu, udang juga menjadi komoditas penting yang sering ditemukan di sekitar habitat mangrove. Nelayan biasanya menggunakan bubu dan jaring kepiting untuk menangkap kepiting, sementara untuk menangkap ikan, mereka menggunakan perahu kecil yang tidak terlalu jauh dari pantai. Namun, bagi nelayan dengan perahu yang lebih besar, mereka akan mencari ikan di perairan yang lebih dalam, bahkan hingga dua mil dari garis pantai, dengan menggunakan jaring yang lebih besar atau teknik memancing yang berbeda. Ada pula nelayan yang menggunakan kapal bagan untuk menangkap ikan teri dan cakalang.

Kelimpahan sumber daya laut menjadi alasan utama pemukiman bergeser dari daerah perbukitan ke wilayah pesisir pantai, khususnya di Tapunggaya Baru. Akses yang mudah ke laut memudahkan para nelayan dalam merawat perahu, membawa perlengkapan yang dibutuhkan saat melaut, serta mengangkut hasil tangkapan mereka kembali ke daratan atau rumah. Saat Tim bertemu dengan Wayasa dan Haris, hal ini menjadi catatan penting yang mencerminkan perubahan besar dalam pola hidup dan mata pencaharian masyarakat setempat.



*Gambar 10 : Ikan asap milik pedagang di Kelurahan Molawe  
Sumber : Tim Puspaham Sultra Tahun 2023*

Di masa lalu, Kecamatan Molawe merupakan daerah penghasil laut yang luar biasa, dengan ikan hasil tangkapan nelayan umumnya memiliki ukuran yang besar. Ikan-ikan kecil dengan lebar sekitar dua jari orang dewasa tidak dianggap berharga dan biasanya tidak dikonsumsi, karena lebih diutamakan ikan yang berukuran besar dan bervariasi. Namun, ada masa di mana nelayan menangkap ikan dalam jumlah yang berlebihan, menyebabkan kondisi overfishing. Akibatnya, ikan-ikan tersebut dijual dengan harga murah di desa-desa setempat, sebagian dikonsumsi sendiri oleh masyarakat, dan sisanya dijual ke Kota Kendari. Bahkan setelah menjual sebagian besar hasil tangkapan, masih ada ikan yang tersisa. Dalam situasi yang sulit ini, para nelayan terpaksa mengambil tindakan ekstrim dengan menggali pasir di pesisir pantai untuk membenamkan ikan-ikan yang tidak laku terjual. Perubahan dramatis ini mencerminkan pergeseran besar dalam pola ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir akibat dari perubahan dalam sumber daya laut dan praktik penangkapan ikan yang berlebihan.<sup>13</sup>

Harga ikan di masa lalu tidaklah terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah. Sebagai contoh, untuk ikan jenis ruma-ruma, harga per seikatnya sekitar Rp. 15.000,-. Namun, jika dijual per kilogram, harganya sedikit lebih mahal. Nelayan dapat menjual ikan dalam bentuk satuan gabus yang bisa mencapai puluhan kilogram untuk satu gabus. Jika dihitung dari nilai satu gabus pada masa itu, harga ikan ruma-ruma jauh lebih besar, bisa mencapai Rp. 400.000,- hingga Rp. 700.000,-. Nelayan yang menggunakan kapal bagan atau kapal Gae, mampu menghasilkan belasan hingga puluhan gabus dalam satu tangkapan. Artinya, satu nelayan yang memiliki kapal bagan dan kapal Gae bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 10.000.000,- atau bahkan lebih dalam satu kali melaut. Meskipun demikian, hasil tangkapan setiap nelayan bisa bervariasi, tergantung pada peralatan dan kapal yang mereka miliki. Namun, perbedaan ini tidak menjadi masalah di kalangan nelayan, karena mereka percaya bahwa rezeki mereka sudah ditentukan oleh Yang Kuasa.

Namun, persoalan rezeki menjadi sangat besar ketika perusahaan tambang mulai beroperasi. Hal ini terjadi karena dimulainya pengerukan di wilayah daratan, penjarahan pohon secara masif, penggalian tanah untuk pembuatan jalur kendaraan

---

<sup>13</sup> Wawancara Wayasa, Kel. Molawe 10 Nov 2023

berat, pemboran lubang-lubang titik bor, serta penambangan tanah yang mengandung banyak bijih. Awalnya, warga tidak terlalu memahami seberapa luas wilayah yang dikelola oleh perusahaan tambang, tetapi kemudian tanah-tanah tersebut terbawa air hujan dan masuk ke aliran sungai, menyebabkan air di muara Lasolo dan sepanjang garis pantai menjadi keruh. Perubahan drastis ini menunjukkan dampak langsung dari aktivitas pertambangan terhadap sumber daya alam dan kehidupan masyarakat lokal.



***Gambar. 11 : Hasil tangkap nelayan mulai berkurang sejak adanya tambang nikel  
Sumber : Tim Puspaham Sultra Tahun 2023***

Sejak dimulainya tambang, saya sudah berhenti melaut. Biasanya saya melaut sampai di depan Marombo. Kini wilayah Molawe sampai di Marombo sudah keruh, untuk lebih jauh lagi sepertinya perahu saya yang belum sanggup, karena keterbatasan mesin perahu yang masih kecil.<sup>14</sup>

Setelah memutuskan untuk tidak lagi melaut, Haris mencari cara lain untuk bertahan hidup. Dia memutuskan untuk membeli ikan-ikan kecil dan mengolahnya menjadi ikan asap. Dari

---

<sup>14</sup> Wawancara Haris, Kel. Molawe 10 Nov 2023

situlah, Haris memulai usaha menjual ikan asap. Harga jual per satu tusuk ikan asapnya sekitar Rp. 10.000,- di pasaran, namun pedagang yang membeli dari Haris kemungkinan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Berbeda dengan nelayan lainnya, sebagian besar dari mereka memilih untuk beralih profesi menjadi driver, tenaga pengawas, tenaga kebersihan, atau berbagai jasa lainnya di perusahaan-perusahaan tambang. Ini mencerminkan adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan lingkungan ekonomi yang diakibatkan oleh hadirnya industri pertambangan. Haris adalah salah satu contoh dari banyaknya warga yang mencari alternatif mata pencaharian di tengah perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Kisah nelayan di Blok Mandiodo telah menjadi kisah pahit yang tak terlupakan, namun sayangnya tampaknya tak lagi menjadi harapan. Bahkan, seorang pekerja tambang yang ikut dalam pembicaraan dengan Tim mengungkapkan bahwa dia sudah lupa bagaimana cara menggunakan alat tangkap jaring, karena sudah begitu lama tidak melaut lagi. Gusri, seorang pejabat desa, membagikan kisah yang menyedihkan bahwa semasa maraknya pertambangan ilegal, sekitar 65% warga desa memilih untuk bekerja di perusahaan tambang. Sementara jumlah nelayan pada tahun 2022 mencapai 36 orang, namun tahun ini hanya tersisa 10 orang. Sedangkan untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ada sebanyak 12 orang, pegawai honorer 12 orang, dan Pekerja Penerima Upah (P3K) 8 orang. Beberapa lainnya beralih profesi menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti 2 warung isi ulang galon, 1 warung penjualan hp dan pulsa, 1 agen gas elpiji, 2 warung makan, dan 3 tukang. Sisanya memilih untuk menjadi petani di daerah Pasuli. Terkadang, para pekerja tambang yang berhenti bekerja, untuk sementara mereka beralih menjadi petani. Ini menunjukkan pergeseran dramatis dalam struktur mata pencaharian masyarakat setempat, dari mayoritas nelayan menjadi mayoritas pekerja tambang. Di Tapuemea, tidak lagi ada yang mengumpulkan rotan, mencari madu, atau mencari penghidupan di hutan seperti dulu kala.

Pada masa maraknya pertambangan ilegal, Tapuemea dan desa tetangganya sama-sama ramai. Kehidupan terasa selama 24 jam penuh, karena di perusahaan tambang, pekerjaan terus berganti-ganti dengan adanya shift yang telah diatur oleh pihak perusahaan. Penghasilan dari warung makan, warung isi pulsa, isi ulang air, dan kios-kios kecil seperti penjual rokok dan Indomie sangat besar, baik dalam sehari maupun dalam sebulan. Gusri menjelaskan bahwa di Tapuemea terdapat sekitar 100 rumah, namun hanya sekitar 30 rumah yang memiliki kamar kos. Namun, menurut Hargono, dari perhitungannya, rumah yang tidak

memiliki kamar kos-kosan hanya bisa dihitung dengan jari, seperti rumah Kepala Desa, rumahnya sendiri, dan beberapa rumah lainnya, jumlahnya tidak lebih dari 10 rumah.

Jika kita lihat dari jumlah keseluruhan rumah, sekitar 90 rumah dari 100 rumah memiliki kamar kos-kosan dan beberapa kontrakan. Harga sewa kos-kosan berkisar antara Rp. 600.000,- hingga Rp. 1.000.000,- per bulan, sementara harga kontrakan rumah berkisar antara Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 6.000.000,- per tahun. Dengan demikian, pendapatan pemilik rumah pada masa maraknya pertambangan ilegal sangat tinggi. Contohnya, Ridwan (55 tahun) memiliki 4 kamar kos yang disewakan seharga Rp. 600.000,- per bulan dan 2 kamar kos dengan harga sewa Rp. 850.000,- per bulan. Selain dari usaha kos-kosan, Ridwan juga menyediakan jasa cuci pakaian untuk penghuni kos-kosannya, dan memiliki warung makan. Anak laki-laknya bekerja di perusahaan tambang sebagai driver dengan gaji antara Rp. 4.000.000,- hingga Rp. 6.000.000,- per bulan, tanpa menghitung pendapatan tambahan dari lembur dan lainnya. Dengan demikian, pendapatan Ridwan kurang lebih sama dengan para pemilik rumah kos lainnya.

Perahu katinting memegang peranan penting dalam mobilitas warga, memungkinkan mereka untuk menjual dagangan ke desa-desa tetangga, bahkan hingga ke Kota Kendari. Hari pasar bagi warga sekitar Blok Mandiodo dijadwalkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Molawe dan Kecamatan Lasolo, dengan tiga kali pasar dalam seminggu di lokasi yang berbeda. Pasar diadakan pada Hari Senin di Ibukota Kecamatan, Kelurahan Molawe, pada Hari Rabu di Desa Tapungaya, dan pada Hari Kamis di Andowia. Selanjutnya, pasar dilaksanakan pada Hari Minggu di Tinobu, Kecamatan Lasolo.

Mobilitas warga dimulai sejak subuh, sebelum adzan berkumandang, dengan teriakan-teriakan yang mengisyaratkan keberangkatan perahu ke kota. Warga yang ingin ikut akan merespons dengan teriakan yang sama. Di tengah suasana yang masih gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak atau senter besar dengan baterai, mereka berangkat sambil sesekali terdengar teriakan dari warga yang bersiap-siap meninggalkan rumah.

Sebelum hadirnya tambang, masyarakat hidup dalam keteraturan adat dan sosial yang sangat menghormati pemimpin adat, tokoh agama, guru, dan tetua kampung. Para ahli di bidang pertukangan, seperti tukang kayu, pandai besi, dan pencari rotan serta bahan obat dari alam,

juga sangat dihormati. Struktur sosial terkecil adalah ikatan keluarga, yang memiliki jaringan hubungan yang kuat, termasuk sepupu sekali, sepupu dua kali, dan seterusnya.

Warga setempat memiliki kemampuan untuk mudah mengorganisir diri dan bergotong royong karena masih memiliki tokoh panutan yang dapat memberikan petunjuk dan nasehat. Meskipun terdapat keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Blok Mandiodo, hal ini dianggap biasa dan tidak menghambat interaksi sosial antarwarga. Mereka saling memahami dan menjaga satu sama lain dengan baik. Terkadang, kita dapat menemui situasi di mana orang-orang sekitar kita berkomunikasi dalam bahasa yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Namun, di Sulawesi Tenggara, mengenali bahasa dan suku yang berbeda merupakan hal yang umum.

Ketika mencari penghidupan, warga saling membantu dalam mengelola pertanian dan melaut. Mereka terlibat dalam profesi sebagai nelayan, petani, dan pedagang di pasar. Hasil pertanian dan tangkapan nelayan dijual di pasar lokal, di sekitar lingkungan mereka, dan sisanya dijual di Kota Kendari. Pada periode tahun 1980 hingga 2000-an, Molawe dan desa sekitarnya menjadi salah satu penyuplai hasil pertanian dan tangkapan ikan ke Kota Kendari. Namun, karena adanya overfishing, di mana jumlah tangkapan melebihi kebutuhan pasar, ikan yang tidak terjual seringkali ditimbun dalam tanah untuk menghindari bau busuk yang tidak sedap. Pada masa itu, jenis ikan kecil seperti tembang tidak begitu diminati oleh warga, yang lebih memilih ikan dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini menyebabkan tangkapan nelayan untuk jenis ikan tembang dan sejenisnya tidak begitu laris di pasaran.

Topografi wilayah Blok Mandiodo cenderung tidak datar, dengan banyak bukit dan pegunungan. Biasanya, kondisi topografi seperti ini sangat cocok untuk pertanian. Namun, mungkin karena perbedaan kandungan tanah, beberapa tanaman tidak dapat tumbuh subur di sini. Contohnya adalah tanaman cengkeh, meskipun pohonnya hidup tetapi jarang menghasilkan buah cengkeh yang berkualitas. Hal yang sama juga terjadi pada pohon kakao. Meskipun demikian, ada sedikit harapan untuk tanaman mete, meskipun hasilnya belum sebaik di wilayah Kabupaten Muna atau daerah lain yang memiliki kondisi tanah yang lebih mendukung.



*Gambar. 12 : Nampak Kondisi Pasar di hari-hari biasa  
Sumber : Tim Puspaham tahun 2023*



*Gambar. 13 : Nampak aktivitas i Pasar di Desa Tapungaya  
Sumber : Tim Puspaham tahun 2023*

#### **D. Kasus Korupsi di Blok Mandiodo**

Kekayaan sumber daya alam di wilayah blok mandiodo merupakan anugra bagi Masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Komoditas nikel tentunya sangat menggiurkan karena di anggap jika dikelola dengan baik dapat menambah perekonomian Masyarakat, sehingga asumsinya Masyarakat dapat hidup Sejahtera atas pengelolaan sumber daya nikel tersebut.

Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan, pengelolaan sumber daya nikel tersebut hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal atau mereka yang punya Perusahaan nikel tersebut. Hal ini sangat jauh dari harapan Masyarakat yang berada di lingkaran tambang tersebut. Pengelolaan pertambangan nikel yang begitu serampangan telah menyebabkan berbagai persoalan mulai dari kerusakan lingkungan, sosial, pelanggaran HAM, perusakan sumber-sumber penghidupan Masyarakat serta wilayah Kelola Masyarakat.

Yang paling menyedihkan adalah dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dari tahun 2019-2022 terjadi penambangan secara ilegal di blok mandiodo yang dalam pemberitaan media tempo telah mencatat, akibat penambangan ilegal tersebut telah menghilangkan Kawasan hutan seluas sekitar 985 Haktare atau sekurang-kurangnya telah merugikan negara sebesar Rp. 21, 26 Triliun.<sup>15</sup>

Salah satu perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Blok Mandiodo adalah PT. Antam, yang berkolaborasi dengan PT. LAM. Perusahaan PT. LAM kemudian membuat kontrak dengan 39 perusahaan tambang. Namun, menurut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya ada 38 perusahaan yang diizinkan beroperasi di wilayah Blok Mandiodo. Ini mengindikasikan bahwa satu perusahaan belum terdaftar dalam Surat Keputusan tersebut. Dari 38 perusahaan yang diizinkan tersebut, beberapa di antaranya termasuk:

---

<sup>15</sup> <https://majalah.tempo.co/tag/tambang-nikel>

1. PT Sultra Bangun Persada (Direktur Utama dan Pengawas Lapangan);	16. PT Total Mineral Sulawesi;	31. PT Vimi Kembar Group;
2. PT Baraya Nikel Sulawesi- (Direktur Utama dan Pengawas Lapangan);	17. PT Muria Wajo Mandiri;	32. PT Vito Triad Perkasa;
3. PT Matarombeo Energi Sejahtera;	18. PT Geogea Mineralindo;	33. PT Mughni Inti Sulawesi;
4. PT Tolakindo Nickel Indonesia;	19. PT Konawe Mineral Mining;	34. PT Bone Sulawesi Prima (Direktur Utama);
5. PT Bersama Pomalaa Maju;	20. PT Kurnia Ayu Mining;	35. PT Diyon Mining Trading;
6. PT Logam Indo Mulia;	21. PT Dharma Sembaga Nusantara;	36. CV Bumi Sultra Abadi;
7. PT Prima Mineral Sejahtera;	22. PT Tria Cahaya Karomah;	37. PT Damai Mining Sentosa;
8. PT Salam Berkah Mineral;	23. PT Bintang Mining Indonesia;	38. PT Celebes Multisarana Saksi.
9. PT Ayam Jantan Selatan;	24. PT Berkah Alam Sejati Mineral;	
10. PT Bintang Mineral Sejahtera;	25. PT Karunia Alam Celebes;	
11. PT Jaya Bersama Sahabat;	26. PT Bintang Mineral Utama Inti Bumi;	
12. PT Prima Ore Mineral;	27. PT Aufa Mineral Pratama;	
13. PT Monty Gadman Indonesia;	28. PT Altan Bumi Barokah;	
14. PT Abbasy Mining Development;	29. PT Aira Putri Tusawuta;	
15. PT Putri Unaaha 88;	30. PT Anandonia Mining Perkasa;	

Sangat memprihatinkan, pengelolaan sumber daya alam yang begitu buruk telah membawa kerugian terhadap negara terutama kepada Masyarakat yang berada di lingkaran tambang tersebut. Aktivitas pertambangan nikel di Konawe Utara, khususnya di Blok Mandiodo, memberikan dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Intensitas kegiatan tambang dari hulu hingga hilir telah memicu berbagai konflik kepentingan terkait lahan dan sumber daya penghidupan warga di sekitar tambang.

Menuju Pilkada pada 14 Februari 2024, masalah eksplorasi tambang di Sulawesi Tenggara, khususnya di Blok Mandiodo, tampaknya akan menyeret nama-nama baru ke permukaan. Heboh pertama kali terjadi ketika media Tempo mengungkap investigasinya tentang Blok Mandiodo. Selain mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat, media juga menyinggung nama-nama yang memiliki peran penting dalam kemenangan Pilpres Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada November 2023, Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakkum LHK Sulawesi menangkap seorang Ketua tim relawan

pemenangan Barisan Relawan Tangguh Baret Prabowo Sulawesi Tenggara. Anugrah Anca (26), komisar PT AG, sebuah perusahaan tambang nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, adalah salah satu yang ditangkap. Bersama Anugrah, Gakkum LHK juga menangkap LM (28), yang merupakan direktur PT AG. Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun, menyatakan bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan adanya aktivitas penambangan nikel ilegal tanpa izin. (Liputan6.com).

Pada 16 Januari 2024, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dibebaskan dan langsung berangkat menuju Kota Kendari, disambut gembira oleh sebagian besar pendukung dan keluarganya di Bandara Kendari. Pada hari yang sama, muncul dalam banyak pemberitaan media, mantan Gubernur Ali Mazi, yang juga menjabat sebagai Ketua Nasdem Sultra, dijadikan saksi terkait kasus tambang PT Antam di Blok Mandiodo. Blok Mandiodo seolah menjadi drama berulang, di mana satu per satu nama-nama penting terseret ke dalam kubangan galian tambang.

No.	Nama Tersangka	Jabatan/Organisasi
1.	HA	GM PT Antam Konawe Utara
2.	GL	Pelaksana Lapangan PT LAM
3.	OS	Direktur PT LAM
4.	WAS	Pemilik PT LAM
5.	AA	Dirut PT KKP
6.	SM	Kepala Geologi Kementerian ESDM
7.	EBT	Evaluator RKAB Kementerian ESDM
8.	YB	Koordinator Pokja Pengawasan Operasi Produksi Mineral Kementerian ESDM
9.	RJ	Eks Dirjend Minerba Kementerian ESDM
10.	HJ	Sub Koordinator RKAB Kementerian ESDM RI
11.	AM	Kuasa Direktur PT Cinta Jaya
12.	RT	Direktur PT Tristaco
13.	Amel (tersangka penghalangan penyidikan)	

Sumber : <https://sultranesia.com/ini-daftar-13-tersangka-kasus-korupsi-pertambangan-di-blok-mandiodo/>

Nama mantan Gubernur Sultra, Ali Mazi, terseret dalam persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Blok Mandiodo Konut, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kabarnya, mantan Gubernur Sultra ini dipanggil oleh Majelis Hakim sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Asisten Bidang Intelijen Kejati Sultra, Ade Hermawan S.H., M.H, membenarkan hal ini. Melalui keterangan resmi, ia mengungkapkan bahwa telah ditemukan fakta baru, yaitu adanya keterlibatan mantan Gubernur Sultra AM dalam Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Antam Tbk, Perusda Sultra, dan PT Lawu Agung Mining. (Kiat Indonesia, 14 Januari 2024 dan Kendari Kta, 3 Feb 2024).

Menurut Hargono, salah satu informan peneliti mengatakan bahwa “aktivitas pertambangan illegal sebenarnya sudah lama terjadi, akan tetapi dalam penegakan hukumnya sangat lemah, sudah sering dilaporkan ke Kejaksaan dan Polisi tetapi lagi-lagi tidak ada keseriusan dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Bahkan sejak dulu kami mendapatkan informasi jikal APH ikut melakukan penambangan di wilayah blok mandiodo. Selain itu hargono, juga menambahkan bahwa selama ada tambang lingkungan dan sumber-sumber kehidupan Masyarakat menjadi rusak.

### **3.4 Lemahnya Pengawasan Dalam Aktivitas Tambang**

Kekayaan Alam yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara utamanya pada sektor tambang yang dikelola jauh dari masa kolonial hingga kini, ternyata belum memberikan kontribusi maupun manfaat yang optimal bagi rakyat dan daerah. Padahal kekayaan sumberdaya alam di Sulawesi Tenggara, jika ditakar akan mampu menjamin 2 juta lebih jiwa selama beribu tahun lamanya.

Paradigma pengelolaan sumberdaya alam memang belum sepenuhnya terstruktur dengan baik, apalagi jika dikaitkan konsep keberlanjutan dan asas manfaat terhadap masa depan masyarakat dan lingkungan hidup. Pendewaan secara berlebihan kepada investor memang salah satu penyakit yang paling serius dalam mengelola tata pemerintahan. Argumentasi yang muncul dari para birokrasi bahwa sumberdaya alam membutuhkan investasi besar-besaran belakangan bukanlah meraih untung malah buntung.

Sengaja datang atau hanya kebetulan lewat, bumi anoa sebagai julukan Sulawesi Tenggara akan sangat nampak sebagai wilayah dengan basis keanekaragaman hayati terbesar ketiga di Indonesia (data IUNCH, 2001). Mungkin tak dapat disangkal jika setiap jengkal tanah di Sultra terdapat beberapa flora dan fauna yang tidak terdapat pada daerah lain (endemik). Kekayaan sumberdaya alam tersebut oleh sekelompok masyarakat adat yang hingga saat ini masih tetap berdiri ditengah leluhur mereka menjelaskan melalui beraneka ragam karya kebudayaan, interaksi sosial-budaya dan ekonomi.

Kini kekayaan sumberdaya alam yang mestinya dimanfaatkan secara arif dan bijaksana di Sulawesi Tenggara diperhadapkan pada malapetaka yang mesti ditanggung oleh generasi yang akan datang. penghancuran sistematis pranata sosial-budaya sangat nampak terjadi di beberapa wilayah sumberdaya alam yang padat. Sebut saja Konawe Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Kolaka Utara, Kabaena, dan Wawonii, wilayah-wilayah ini merupakan pusaka satu-satunya Kebudayaan Tolaki, melalui tanah dan hamparan benda alam kini tak satupun menjadi warisan leluhur.

Kondisi ini muncul karena banyaknya persoalan yang bermula dari hulu yaitu ketika liberalisasi perizinan pertambangan dikeluarkan dengan semena-mena, tidak transparan, dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Hal ini melahirkan beragam persoalan semisal konflik tenurial, hancurnya hutan, konflik sosial dan degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini melahirkan potret tata kelola pertambangan yang carut-marut, tanpa visi, berorientasi bisnis semata dan mengabaikan interaksi dalam ruang-ruang sosial yang telah mapan dalam masyarakat. Sejumlah resistensi simbolik pernah ditunjukkan berbagai elemen terhadap perusahaan tambang di daerah ini. Aksi demonstrasi, pemblokiran jalan maupun caci-maki adalah gambaran betapa berbagai indikator dampak positif pertambangan yang coba disajikan pemerintah daerah ataupun perusahaan pertambangan sendiri masih belum tercapai. Alasan-alasan seperti kesempatan kerja, perbaikan infra struktur maupun penerimaan daerah ternyata belum sebanding dengan kerusakan akibat tata kelola tambang yang buruk.

Berbagai persoalan yang muncul diatas, memang tidak mengharuskan kita berada pada opsi mengharamkan tambang!, yang diperlukan adalah suatu posisi yang proaktif untuk mendorong agar dampak positif pertambangan dapat dimaksimalisasi dan disisi lain dampak negatif pertambangan dapat diminimalisir.

Untuk menuju kearah tersebut maka diperlukan pembenahan terhadap sektor pertambangan mulai dari hulu hingga hilir guna melahirkan suatu tata kelola tambang yang bernilai tinggi secara ekonomis, menjaga daya dukung lingkungan dan adaptif secara sosial-budaya. Oleh karena itu perlu di dorong perusahaan tambang, untuk tidak hanya mengejar keuntungan bisnis semata. Namun senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum.

### **3.5. Industri Pemurnian (Smelter)**

Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, sejumlah kebijakan pembangunan kawasan industri di genjot dan di dukung melalui pembangunan proyek strategi nasional (PSN). pembangunan kawasan industri dilakukan di luar pulau jawa, salah satunya di Pulau Sulawesi. ambisi pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur mulai nampak dengan berhasilnya pembangunan pabrik smelter di sejumlah daerah di indonesia dan salah satunya berada di Morosi, Kabupaten Konawe, provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembangunan smelter saat ini, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi industri pertambangan nikel, hilirisasi tidak berfokus pada produksi baterai kendaraan listrik, akan tetapi pada pembuatan baja tahan karat yang mengandalkan NPI. dan pada tahun 2022 indonesia berhasil menjadi negara produsen NPI-baja nirkarat terbesar kedua, setelah Tiongkok, dengan menghasilkan sebanyak 5,7 juta ton, atau meningkat sebesar 700 ribu ton dengan hanya rentang satu tahun. pertumbuhan ini tentunya tidak lepas dari kontribusi kawasan-kawasan industri berbasis nikel, seperti industri Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan Obsidian Stainless Steel (OSS) yang berada di Morosi, Kabupaten Konawe dan Motui Konawe Utara.

#### **1) Aktivitas Industri Smelter VDNI dan OSS**

Kecamatan Morosi merupakan bagian dari Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas 76.49 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 10.645 jiwa mendiami sepuluh desa yaitu, Desa Mendikonu, Wonua Morini, Besu, Paku, Puuruy, Morosi, Tanggoba, Paku Jaya, Tondowatu dan Desa Porara. Penduduknya terdiri dari suku Tolaki, Bugis, Makassar, Buton, Muna, Jawa dan lainnya, dengan mayoritas beragama Islam.<sup>16</sup> Namun,

---

<sup>16</sup> Kecamatan Morosi dalam Angka 2019.

fakta dilapangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk khususnya di desa Morosi sangat besar oleh adanya warga pendatang yang tinggal di Kos-kosan yang sulit didata secara resmi oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai pekerja di pabrik nikel, petani, tambak dan pengolahan pasir. Pada tahun 2014 di desa Morosi dan desa Porara mulai dibangun pabrik feronikel Perusahaan Modal Asing (PMA) PT Virtue Dragon Nickel dari Jiangsu China. VDNI merupakan salah satu pemegang izin usahapertambangan khusus. Perusahaan ini berinvestasi 1,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,6 triliun.

Kemudian tahun 2018 didirikan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Seiring dengan dibangunnya industrinikel tersebut, tenaga kerja China mulai berdatangan di daerah Morosi. Sesuai data dari Disnakertrans Sulawesi Tenggara per tanggal 18 Februari 2019 jumlah tenaga kerja asing khusus untuk yang bekerja di PT. VDNI berjumlah sebanyak 1452 pekerja. Tenaga kerja China secara tidak langsung berinteraksi dan berbaur dengan 11 ribu lebih tenaga kerja lokal yang bekerja pada perusahaan VDNI dan OSS serta warga yang berada di sekitar kawasan industri tersebut.

## **2) Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)**

Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe resmi beroperasi. Pabrik pemurnian nikel ini merupakan satu dari 14 kawasan industri yang dibangun di luar pulau Jawa menjadi industri yang terintegrasi dan akan menghasilkan stainless steel dengan investasi awal mencapai 2 milyar US\$ yang diresmikan pada hari Senin 25 Februari 2019.

Smelter yang dibangun di atas lahan seluas 700 hektar dengan nilai investasi 1,4 milyar US\$ untuk 15 line sebagai yang terbesar di Indonesia. Pabrik pemurnian nikel ini VDNI ditaksir bisa memproduksi nickel pig iron (NPI) 600 -800 NPI pertahun. Realisasi investasi PT VDNI saat ini meliputi pabrik pengecoran dan peleburan Nickel Pig Iron (NPI) yang memiliki kadar nikel antara 10 persen hingga 12 persen.

PT VDNI berdiri sejak tahun 2014 merupakan anak perusahaan Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd merupakan perusahaan terkemuka dalam bidang ferronickel. Dengan nilai investasi mencapai US\$ 1 Miliar, fasilitas ini berdiri di dalam kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park

(VDNIP) seluas 2.253 hektar dengan menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja. Selain smelter, untuk menunjang mobilitas dan mempermudah proses logistik serta pengapalan mineral hasil olahan, dalam kawasan industri VDNIP ini juga terdapat fasilitas dermaga yang memiliki kapasitas hingga 2.500.000 DWT per tahun.

Pada bulan September 2017 lalu, untuk pertama kalinya PT VDNI juga telah melakukan kegiatan ekspor perdana mineral hasil olahan (NPI) sebanyak 7.733 metrik ton yang diekspor ke China. Bahan pendukung utama 15 Tungku Peleburan dan Smelter (Pemurnian) milik PT. VDNI Morosi adalah PLTU (batu batu) dengan kapasitas terpasang 2 x 60 MT.

Proses pengolahan nikel dari awal sampai menghasilkan produk akhir Nickel Pig Iron (NPI). Bijih nikel disimpan pada stockpile. Kemudian bijih nikel tersebut dipindahkan dengan menggunakan conveyor ke rotary dryer. Rotary dryer adalah salah satu jenis mesin pengering yang secara khusus digunakan untuk mengeringkan aneka bahan padatan. Bijih nikel dimasukkan dari ujung inlet melalui screw conveyor dan dikeringkan sepanjang tabung atau drum yang berputar. Proses pengeringan dilakukan pada suhu sekitar 250 derajat Celcius dengan tujuan mengeliminasi sebagian besar air bebas yang terdapat dalam bijih nikel. Selanjutnya, produk dari rotary dryer masuk ke dalam proses kalsinasi dengan menggunakan rotary kiln pada suhu sekitar 800-900 derajat Celcius. Rotary kiln merupakan suatu reaktor berbentuk silinder panjang, berputar, dipasang dengan sudut kemiringan tertentu yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur nikel sampai suhu yang tinggi. Proses kalsinasi bertujuan untuk eliminasi air bebas yang tersisa dan eliminasi air kristal, pemanasan awal bijih dan reduksi sebagian besar unsur nikel dan pengontrolan terhadap reduksi besi.

Hasil proses kalsinasi kemudian dilebur di dalam electric furnace pada temperatur sekitar 1500-1600 derajat Celcius untuk menghasilkan feronikel. Hasil proses electric furnace smelting kemudian didinginkan dan dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Hasil proses pencetakan berupa feronikel. Feronikel adalah logam paduan antara besi dan nikel, dimana kandungan nikel bervariasi dari 25-45 persen. Feronikel digunakan sebagai bahan penguat dalam pembuatan baja.

Nikel dan logam kromium merupakan unsur logam pemadu yang terdapat di dalam baja tahan karat. Juga terdapat Limbah nikel (slag) yang merupakan sejenis batuan hasil pembuangan dari pembakaran feronikel, berwarna kelabu perak dan memiliki sifat-sifat menyerupai batu dan unsur silikat serta kapur yang terkandung didalamnya cukup tinggi. Pada tahun 2020, PT. VDNI mengolah ore nikel sebanyak 7.28 juta ton. Saat ini kapasitas produksi mencapai 1 juta ton, sedangkan produksi baru mencapai 674 ribu ton Feronikel (FeNi). Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan listriknya, VDNI juga membangun PLTU dengan kapasitas total sebesar 530 M.

### **3) Obsidian Stainless Steel (OSS)**

Selasa, 20 Agustus 2019, Proyek Pembangunan PT. Obsidian Stainless Steel (PT. OSS) di Kec. Bondoala Kab. Konawe, serta PT. Pelabuhan Muara Sampara (PT. PMS) di Desa Lalimbue Jaya, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe. Untuk PT. OSS Proyek Tersebut merupakan proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi untuk Industri Besi dan Baja dan Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Rp. 34 Triliun.

Dengan luas lahan usaha proyek industri 400 Ha. Untuk saat ini PT. OSS telah menyelesaikan tahap pembangunan PLTU 2 x 125 Mw dari rencana 1400 Mw yang sudah Running pada bulan Oktober 2019. PT. Pelabuhan Muara Sampara (PT. PMS) Proyek tersebut merupakan proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi awal Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut Rp. 417 Milyar dengan luas lahan sesuai izin lokasi proyek 86 Ha.

### **4). Jetty**

Berdasarkan interaksi Tim di lapangan, diperoleh informasi terdapat 9 titik jetty sepanjang pesisir Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo dan Lasolo Kepulauan. Dalam penelusuran melalui media, Jetty yang memiliki izin bongkar muat adalah PT. Cinta Jaya. Sedang status jetty yang lainnya, memiliki status yang berbeda-beda. Untuk jetty yang berada di wilayah Blok Mandiodo, yakni:

1. PT. Cinta Jaya, di Desa Mandiodo (aktif)
2. PT. BKM di Desa Tapungaya (aktif)
3. PT. KKP (ditutup)
4. PT. Sriwijaya Raya (Desa Tapuemea)

5. Jetty di Lahan Pak Basir (ditutup)
6. Jetty di Lahan Pak Sudiro (ditutup)

Dari sekian banyak jetty yang ada di wilayah Blok Mandiodo, untuk saat ini, ada dua jetty yang beroperasi, jetty milik PT. BKM dan PT. Cinta Jaya. Tim belum memastikan terkait jetty PT. Cinta Jaya II yang dibangun. Sebelumnya, dalam pemberitaan media, jetty PT. Cinta Jaya II sempat ditutup oleh aparat terkait soal perizinan yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan.

Untuk dua jetty yang berada di lahan warga, lahan milik pak Basir dan Pak Sudiro sampai hari ini belum beroperasi. Untuk jetty yang lainnya tersebar di Kecamatan Lasolo Kepulauan dan lainnya, salah satunya:

1. PT. PT. Wanagon Anoa Indonesia
2. PT. BSJ (Blok Buenaga, Kec. Lasolo Kepulauan)

- 1) Berdasarkan syarat-syarat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pertambangan Eksploitasi baru dapat diproses jika Surat permohonan, melampirkan peta wilayah yang dimohonkan, Laporan lengkap eksplorasi, Laporan study kelayakan, Dokumen Amdal dan UKL-UPL, Rencana kerja dan biaya, Rencana tahunan, Tanda bukti pembayaran iuran tetap, Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan, dan tanda bukti penyetoran jaminan reklamasi, serta Izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan.
- 2) Selain itu, kewenangan dalam pemberian IUP sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 harus memperhatikan
- 3) Fenomena penerbitan IUP di beberapa daerah terutama Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara diduga telah melakukan pelanggaran administrasi, hal ini dapat dilihat beberapa perusahaan yang semestinya diberikan sanksi berupa pencabutan IUP dan desa akibat pembuatan jalan produksi dikawasan hutan (kasus Kolaka) serta wilayah IUP di pada sarana public ( Konawe Utara, PT. Sriwijaya)
- 1) Menurunnya prestasi prestasi dan kualitas pendidikan siswa SD, SMP, SMK), kualitas hidup masyarakat
- 2) Masyarakat kekurangan air untuk minum dan mandi



*Gambar.14 : Smelter Virtue Dragon Nikel Industri di Kec. Morosi, Kab. Konawe.  
Sumber : WALHI Sultra 2023*



*Gambar. 15 : Kondisi Udara di Wilayah Smelter OSS  
Sumber : WALHI Sultra Tahun 2023*



*Gambar 16 : Jetty 1 dan 2 milik PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo.  
Sumber : Puspaham Sultra 2023*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

**Adapun beberapa point kesimpulan dalam penelitian, yaitu :**

1. Kerusakan Lingkungan: Penambangan ilegal di Blok Mandiodo memiliki dampak serius terhadap ekosistem hutan dan laut. Hutan mengalami deforestasi yang signifikan, menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati dan merusak habitat alami. Di sisi laut, penambangan ilegal mencemari perairan dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
2. Pencemaran Udara dan Darat: Kegiatan penambangan ilegal seringkali menghasilkan polusi udara dan tanah. Debu dan gas beracun yang dilepaskan selama proses penambangan dapat mencemari udara di sekitarnya, sementara limbah dan bahan kimia beracun dapat mencemari tanah, merusak produktivitas pertanian dan kesehatan masyarakat setempat.
3. Bancakan untuk Pembiayaan Politik: Penambangan ilegal di Blok Mandiodo ternyata juga menjadi sumber dana untuk pembiayaan politik. Praktik ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat merusak integritas proses politik dan mengarah pada konflik kepentingan.
4. Potensi Penyalahgunaan dan Korupsi Sumber Daya Alam (SDA): Keberadaan penambangan ilegal dapat membuka peluang besar untuk penyalahgunaan dan korupsi sumber daya alam. Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tersebut.
5. Perlu Tindakan Penegakan Hukum: Kesimpulan riset menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Blok Mandiodo sangat penting. Langkah-langkah penegakan hukum yang efektif harus diambil untuk menghentikan kegiatan ilegal ini dan menghukum pelaku serta pihak yang terlibat.
6. Perlunya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Kesimpulan riset juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Blok Mandiodo. Pendekatan ini melibatkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam merancang kebijakan dan praktik eksploitasi yang berkelanjutan.

7. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Nasi: Nasi sebagai salah satu sumber karbohidrat utama di berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki peran penting dalam pola makan masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap nasi sebagai sumber energi utama membuatnya rentan terhadap perubahan kondisi produksi nasi, seperti yang dapat dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.
8. Dampak Keanekaragaman Hayati: Kondisi kerusakan lingkungan dan deforestasi akibat penambangan ilegal dapat merugikan keanekaragaman hayati. Tanaman padi, sebagai tanaman yang mendukung produksi nasi, dapat terpengaruh oleh hilangnya habitat alami dan perubahan iklim. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas nasi, serta mengancam keberlanjutan pertanian.
9. Kaitan dengan Kesehatan Masyarakat: Kesehatan masyarakat dapat terpengaruh oleh kondisi ekosistem yang terganggu. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat memengaruhi ketersediaan nutrisi yang penting untuk kesehatan masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, termasuk hasil pertanian seperti nasi, dapat mengalami dampak negatif terkait dengan keseimbangan gizi.
10. Pentingnya Keberlanjutan Pertanian: Kesimpulan juga dapat menyoroti urgensi praktik pertanian yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan pertanian, perlu dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. Ini termasuk memitigasi dampak penambangan ilegal dan mengembangkan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

#### **4.2. Rekomendasi**

Ada tiga point penting rekomendasi penulis dalam riset ini, yaitu :

1. Pemantauan kualitas lingkungan perlu dilakukan secara berkala dalam rentang waktu tertentu. Pemantauan ini perlu dilakukan oleh dua pihak, yaitu perusahaan dan pemerintah. Tidak hanya dalam kawasan industri, tapi juga pada komponen lingkungan di desa-desa terdampak.
2. Hasil pemantauan kualitas lingkungan dapat diakses publik agar masyarakat dan pemerhati lingkungan dapat turut serta memantau. Salah satu infrastruktur yang perlu disediakan oleh perusahaan dan pemerintah daerah adalah papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau teknologi lainnya yang dapat dipasang di area-area berisiko.

3. Evaluasi dan Moratorium izin pertambangan perlu dilakukan mengingat dampak yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan begitu massif terhadap lingkungan, ekonomi dan Kesehatan Masyarakat.



## Daftar Pustaka

- Adijaya, Sarlan. 2022. Orang Lain Berlabuh Aku Yang Tenggelam (Kisah Tuan Tanah di Negeri Leluhur). Penerbit, Universitas Halu Oleo Press. Kendari.
- Investigasi Tempo. 29 Januari 2023. *Investigasi Pencakar Nikel Ilegal*.
- Kolaborasi Kementerian Kebijakan Nasional BEM KM IPB, dkk, 2020. Kajian Korupsi Sumber Daya Alam Menguak Agenda Gelap Kebijakan Sumber Daya Alam. Penerbit Institut Pertanian Bogor
- Kecamatan Molawe Dalam Angka. KECAMATAN MOLawe DALAM ANGKA 2023. 2023. MOLawe SUB DISTRICT IN FIGURES 2023. ISSN: 2746-2005 No. Publikasi / Publication Number: 74100.2314 Katalog / Catalog: 1102001.7410. Diterbitkan oleh/Published by: ©BPS Kabupaten Konawe Utara.*
- Kecamatan Morosi dalam Angka. 2019.
- Tarimana, Abdurrauf. *Kebudayaan Tolaki*. 1993. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, Ridwan., dkk. 2019. *Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tsunami*. Diterbitkan: BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
- Koalisi Penyelamat Lingkungan Sultra: Walhi Sultra, KPA, PPLH Unsultra, Forsda Kolaka. 2011. *Investigasi Kerusakan Lingkungan di Areal Tambang di Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara*.
- Bersihkan Indonesia. 2020. Curang di Lubang Tambang; Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Diterbitkan Auriga. Jakarta, Indonesia.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/5452204/gakkum-klhk-tangkap-pelaku-penambangan-nikel-ilegal-di-sulawesi-tenggara?page=2>
- <https://www.oyisultra.com/2024/01/21/disebut-di-perkara-blok-mandiodo-dpp-knpi-dukung-kejagung-ungkap-peran-mantan-gubernur-sultra/>
- <https://www.kiatIndonesia.com/nasional/37211570716/peran-ali-mazi-dalam-kasus-korupsi-wiup-pt-antam-blok-mandiodo>
- Sumber Artikel berjudul "Ampuh Sultra Sebut Ali Mazi Intellectual Dader Kasus Korupsi Pertambangan di Wilayah IUP PT Antam", selengkapnya dengan link: <https://kendari.pikiran-rakyat.com/sultra-kita/pr-2497671909/ampuh-sultra-sebut-ali-mazi-intellectual-dader-kasus-korupsi-pertambangan-di-wilayah-iup-pt-antam>
- <https://detiksultra.com/hukum/tak-hanya-menambang-ilegal-pt-ggm-disebut-jual-ore-nikel-pakai-dokumen-pt-kkp/>